



**PENETAPAN UNDANG -UNDANG ANTI -TENTARA BAYARAN TAHUN
2007 DI REPUBLIK AFRIKA SELATAN**

***(THE ENACTMENT OF ANTI-MERCENARY LAW 2007 IN THE
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA)***

SKRIPSI

oleh

Bima YovioneValentino

110910101035

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019



**PENETAPAN UNDANG -UNDANG ANTI -TENTARA BAYARAN TAHUN
2007 DI REPUBLIK AFRIKA SELATAN**

***THE ENACTMENT OF ANTI-MERCENARY LAW 2007 IN THE
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh:

Bima Yovione Valentino

110910101035

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Chairusdiana Noviaty, S.Pd. dan Ayahanda Alm. Cahyo Mulyono, S.H. yang telah memberikan dukungan, doa dan kasih sayang hingga saat ini;
2. Guru-guru sejak Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jember.

MOTTO

“My life is shaped by the urgent need to wander and observe, and my camera is my passport.”

Steve McCurry¹



¹ Kutipan ini berasal dari Steve McCurry, seorang fotografer pemenang berbagai penghargaan internasional. Carr, Dan. Januari 2016. Kutipan ini diakses dari <https://shuttermuse.com/65-inspirational-photography-quotes/>.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bima Yovione Valentino

NIM : 110910101035

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Penetapan Undang- Undang Anti-Tentara Bayaran 2007 di Republik Afrika Selatan” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 7 Desember 2018

Yang Menyatakan

Bima Yovione Valentino

NIM 110910101035

SKRIPSI

**PENETAPAN UNDANG -UNDANG ANTI -TENTARA
BAYARAN TAHUN 2007 DI REPUBLIK AFRIKA SELATAN
*THE ENACTMENT OF ANTI-MERCENARY LAW 2007 IN THE REPUBLIC
OF SOUTH AFRICA***

Oleh:

Bima Yovione Valentino

NIM 110910101035

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si., Ph.D.

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Agung Purwanto, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Penetapan Undang-Undang Anti-Tentara Bayaran 2007 di Republik Afrika Selatan” telah diuji dan disahkan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 20 Desember 2018
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:
Ketua

Dra. Sri Yuniati, M.Si

NIP. 196305261989022001

Sekretaris I

Sekretaris II

Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D

NIP. 196802291998031001

Drs. Agung Purwanto, M.Si

196810221993031002

Anggota I

Drs. Djoko Susilo, M.Si

195908311989021001

Mengesahkan
Dekan,

Dr. Ardiyanto, M. Si

195808101987021002

RINGKASAN

Penetapan Undang-Undang Anti-Tentara Bayaran 2007 di Afrika Selatan; Bima Yovione Valentino; 110910101035; 2018; 74 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pasca Perang Dingin berakhir, muncul jenis tentara bayaran yang lebih terorganisir, berbentuk badan usaha atau perusahaan dan dikontrak langsung oleh pemerintahan yang terlegitimasi. Para peneliti keamanan global menyebut jenis tentara bayaran tersebut dengan *private military company*. PMC kemudian berkembang pesat yang ditandai dengan munculnya *Executives Outcomes* sebagai “perusahaan” penyedia jasa keamanan dari Afrika Selatan yang memiliki kapabilitas setara kekuatan militer. Pemerintah Afrika Selatan kemudian menerbitkan hukum untuk mengurangi praktek tentara bayaran bernama *Regulation of Foreign Military Assistance Act*, pada tahun 1998. EO berhasil dibubarkan dengan undang-undang tersebut namun praktek tentara bayaran kerap dan terus-menerus terjadi. Pemerintah Afrika Selatan kemudian kembali menerbitkan undang-undang bernama *The Prohibition of Mercenary Activities and Regulation of Certain Activities in Country of Armed Conflict Act* atau Undang-Undang Anti-Tentara Bayaran pada tahun 2007 untuk menghentikan berbagai aksi tentara bayaran dan kontraktor keamanan di Afrika Selatan

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian tersebut meliputi teknik pengumpulan data dan teknik analisa data. Teknik pengumpulan data adalah studi pustaka (*library research*) untuk memperoleh data sekunder. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif. Dalam penjelasan mengenai bagaimana tentara bayaran menjadi ancaman dalam perspektif pemerintah Afrika Selatan, penulis menggunakan konsep Dinamika dan Gangguan Keamanan Global dan *Private Military Company*.

Penulis telah melakukan analisis dan menyimpulkan bahwa Afrika Selatan berusaha untuk mencari formula definisi yang tepat untuk mengisi definisi dan

istilah mengenai tentara bayaran dan kontraktor keamanan yang tepat melalui Undang-Undang Anti-Tentara Bayaran yang baru pada 2007. Kedua, disahkannya Undang-Undang Anti-Tentara bayaran yang baru adalah untuk melarang total aktivitas tentara bayaran dan meregulasi secara ketat aktivitas yang serupa di wilayah konflik global. Afrika Selatan tidak ingin warganegarannya untuk turut berpartisipasi di wilayah konflik global terutama dimana pemerintah Afrika Selatan tidak memiliki kerjasama dan kebijakan luar negeri yang spesifik.



PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah Swt, Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat rahmat, petunjuk serta karunia yang diberikan Allah Swt., sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penetapan Undang- Undang Anti-Tentara Bayaran 2007 di Afrika Selatan”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
3. Dra. Sri Yuniati, M.Si. selaku dosen wali akademik yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa.
4. Bapak Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D, selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Drs. Agung Purwanto, M.Si., selaku dosen pembimbing anggota yang telah meluangkan waktu, membantu penulis selama penyusunan skripsi selama ini.
5. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember, Khususnya Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jember.
6. Segenap Dosen dan Civitas Akademika di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, khususnya Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang tercinta.
7. Pimpinan dan staf perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
8. Segenap teman-teman FISIP, khususnya jurusan Ilmu Hubungan Internasional 2011.

9. Teman-teman UKMF Bola Basket FISIP UNEJ dan Natura Project, yang telah memberikan pengalaman berorganisasi, pengembangan talenta dan pembelajaran kehidupan yang sangat berkesan dan berguna bagi penulis.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tanpa dukungan semangat dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan dengan tugas akhir ini dengan baik. Terima kasih kepada berbagai pihak yang telah disebutkan. Penulis menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak.

Jember, 7 Desember 2018

Penulis

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Negara Pemberi Kontrak Executives Outcomes..... 25
Tabel 2.2 Daftar Perusahaan Penyedia PMC Afrika Selatan 27



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. The Pontifical Swiss Guard, unit militer Vatikan17



DAFTAR SINGKATAN

EO	<i>Executives Outcomes</i> (Perusahaan Penyedia Jasa Keamanan dari Afrika Selatan)
HAM	Hak Asasi Manusia
ICoCA	<i>The International Code of Conduct for Private Security Service Provider</i> (Kode Etik untuk Penyedia Jasa Keamanan Swasta Internasional)
MPRI	<i>Military Professional Resources Inc</i> (Perusahaan penyedia jasa keamanan)
MTS	<i>Meteoric Tactical Solutions</i> (Perusahaan penyedia jasa keamanan)
NCACC	National Conventional Arms Control Committee (Komite Nasional Kontrol Senjata Api Konvensional)
NGO	<i>Non-Governmental Organization</i> (Organisasi Non-Pemerintahan)
OAU	<i>Organization of African Unity</i> (Organisasi Kesatuan Afrika)
PBB	Persatuan Bangsa-Bangsa
PMAA	<i>The Prohibition of Mercenary Activities and Regulation of Certain Activities in Country of Armed Conflict Act</i> (Undang- Undang Larangan Aktivitas Tentara Bayaran dan Regulasi Aktivitas Serupa di Wilayah Konflik Bersenjata)
PMC	<i>Private Military Company</i> (Perusahaan Penyedia Keamanan Militer Swasta)
RFMA	<i>Regulation of Foreign Military Assistance Act</i> (Undang-Undang Regulasi Perbantuan Militer Asing)
RUF	<i>Revolutionary United Front</i> (kelompok pemberontak Front Revolusioner Bersatu)
SADF	<i>South Africa Defences Force</i> (Angkatan Bersenjata Afrika Selatan)
SAS	Special Air Services (Pasukan Khusus Angkatan Udara Inggris)
TNC	<i>Third National Countries</i>

	(Warganegara Pihak Ketiga)
UNITA	<i>National Union for the Total Independence of Angola</i> (Kelompok Perserikatan Nasional untuk Kemerdekaan Total Angola)
UU	Undang-Undang
VOC	<i>Vereenigde Oostindische Compagnie</i> (Perusahaan Hindia Timur Belanda)



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR BIMBINGAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	5
1.2.1 Batasan Materi.....	5
1.2.2 Batasan Waktu.....	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Kerangka Konseptual	6
1.5.1 Konsep Private Military and Security Company.....	6
1.5.2 Dinamika Pasar dan Gangguan Keamanan Global.....	10
1.6 Argumen Utama	12
1.7 Metode Penelitian	12
1.7.1 Teknik Pengumpulan Data	12
1.7.2 Teknik Analisis Data	13
1.8 Sistematika Penulisan	13

BAB 2. TENTARA BAYARAN DARI AFRIKA SELATAN	15
2.1 Gambaran Umum Tentara Bayaran	15
2.1.1 Periode Klasik	15
2.1.2 Periode Modern	19
2.2 Tentara Bayaran Afrika Selatan.....	22
2.3 Tentara Bayaran dalam Hukum Internasional	31
2.3.1 Pendefinisian Tentara Bayaran dalam Hukum Internasional	32
2.3.2 Kegagalan Hukum Internasional dalam Mengatur Industri Keamanan dan Private Military Company	36
BAB 3. KEGAGALAN UU ANTI-TENTARA BAYARAN I TAHUN 1998..40	40
3.1 Kegagalan RFMA 1998 sebagai Regulator Industri Keamanan Swasta Afrika Selatan	40
3.2 PMAA 2007 sebagai UU Anti – Tentara Bayaran II.....	47
BAB 4. ANALISIS FAKTOR YANG MENDASARI PENETAPAN UNDANG-UNDANG ANTI-TENTARA BAYARAN II TAHUN 2007 OLEH PEMERINTAH REPUBLIK AFRIKA SELATAN.....	50
4.1 Pencegahan terhadap Potensi Terjadinya Distorsi Definisi Tentara Bayaran pada RFMA 1998	50
4.2 Pencegahan Keterlibatan Tentara Bayaran Afrika Selatan dalam Pasar Penyedia Jasa Keamanan Swasta dan Eliminasi terhadap Gangguan Keamanan Global	57
4.2.1 Mereduksi Ancaman terhadap Kebijakan Luar Negeri Afrika Selatan dan Kestabilan Keamanan Regional dan Global	58
4.2.2 Menghapus Ketersediaan Pasar Regional atas Jasa Keamanan Swasta.....	61
BAB 5. KESIMPULAN	65
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Afrika Selatan memiliki sejarah yang panjang mengenai ekspor tentara bayarannya. Mayoritas dari tentara bayaran ini merupakan generasi tentara nasional Afrika Selatan yang merasa disingkirkan ketika Tembok Berlin runtuh dan Perang Dingin berakhir. Ketika Nelson Mandela dibebaskan dan saat kebutuhan militer Afrika Selatan harus dikurangi secara drastis, rezim pemerintah yang baru ini mengabaikan tentara-tentara nasionalnya yang mayoritas berkulit putih. Hanya dilatih sebagai prajurit, mereka kesulitan menemukan pekerjaan alternatif setelah kesatuannya dibubarkan. Tentara-tentara ini merasa terasing di bawah pemerintahnya sendiri yang mayoritas orang-orang berkulit hitam dan kemudian mengejar “perang pribadinya” untuk menyambung hidup (Baiocchi, 2015). Tentara-tentara yang disingkirkan pasca tergulingnya pemerintah Pro-Apartheid kemudian menjadi tentara bayaran atau membuka jasa pengamanan swasta yang memiliki standar kualitas militer atau biasa disebut *Private Military Company* dan *Private Security Company*.

Salah satu tentara yang menjadi pionir munculnya tentara bayaran modern Afrika Selatan pada medio 1990-an adalah Kolonel Eben Barlow. Selama apartheid, Kolonel Eben Barlow bertugas di *South Africa Defense Forces*, sebuah unit militer bermayoritaskan orang kulit putih yang membela rezim yang sedang melawan pemberontakan dan perang perbatasan dengan negara tetangganya Angola, dan wilayah-wilayah yang sekarang menjadi bagian dari negara Namibia. Pada tahun 1989, saat apartheid mulai runtuh, ia mendirikan *Executive Outcomes* (EO), sebuah perusahaan militer swasta yang terdiri dari banyak mantan anggota pasukan keamanan Afrika Selatan. Sebagai salah satu pionir "tentara swasta modern", pada tahun 1995 EO berhasil membantu pemerintah Sierra Leone mempertahankan diri melawan para pemberontak dari Front Persatuan

Revolusioner yang terkenal karena memotong lengan musuh -musuh mereka (Freeman,2015).

Executive Outcomes mengklaim bahwa satu-satunya tujuan mereka adalah untuk membawa stabilitas ke wilayah-wilayah tersebut dengan mendukung pemerintah yang sah dalam perlawanan mereka terhadap pemberontak bersenjata (Executive Outcomes Company Profile, 2011). Hal tersebut didukung dengan contoh beberapa aksi militer EO di Benua Afrika. Tentakel EO telah menyebar secara luas ke seluruh Afrika. EO juga pernah memberikan pelatihan militer untuk tentara di Malawi, Mozambik, Botswana, Madagaskar dan Aljazair (Wrigley, 1999). Tahun 1990-an merupakan masa puncak untuk para tentara bayaran dimana banyak negara mengontrak mereka, baik itu dari pihak pemerintah legal yang diakui secara global, perusahaan- perusahaan tambang hingga pemberontak.

Pada tahun 1998, pemerintah Afrika Selatan mengeluarkan undang-undang untuk mengurangi aktivitas ilegal lintas perbatasan yang dilakukan EO dan beberapa jenis kelompok tentara bayaran lainnya dengan menetapkan *Regulation of Foreign Military Assistance Act, 1998* (RFMA) sebagai pedoman hukum negara dalam menghadapi aktifitas tentara bayaran. RFMA ditetapkan dengan tujuan melarang bentuk-bentuk aktifitas tentara bayaran, menjadikannya sebagai sebuah larangan bagi warga negara Afrika Selatan untuk merekrut, menggunakan atau untuk melatih seseorang, atau mendanai atau terlibat dalam kegiatan tentara bayaran, yang didefinisikan sebagai 'partisipasi langsung sebagai kombatan dalam konflik bersenjata untuk keuntungan pribadi (Press, 1998).

Undang-Undang tersebut dirancang sebagai upaya untuk memberikan efek jera melalui peraturan mengenai pemberian bantuan militer asing oleh orang-orang yang secara hukum adalah penduduk Afrika Selatan, warga negara, orang-orang yang secara permanen menetap di Republik (Afrika Selatan) dan warga negara asing yang memberikan bantuan tersebut (bantuan militer) dari dalam perbatasan Republik (Abraham, 1999). Keberadaan hukum undang-undang RFMA ini dipandang sebagai sebuah kemajuan sebagai alat untuk melarang aktivitas tentara bayaran internasional yang berasal dari Afrika Selatan.

Setelah RFMA disahkan dan EO dengan resmi telah membubarkan diri seiring berlakunya hukum RFMA, para penyedia jasa keamanan militer asal Afrika Selatan mulai mengerucutkan profil perusahaannya, namun mereka lebih memiliki keunggulan spesialisasi khusus dan hanya sedikit dari mereka yang menawarkan jasa bertempur secara langsung serta sebagian lainnya menawarkan jasa non-kombatan yang dikarenakan larangan praktek tentara bayaran dalam undang-undang baru RFMA (Taaljard, 2006). Hal ini menjadi sebuah tren baru dimana banyak mantan tentara bayaran EO yang mendirikan korporasi legal berbentuk jasa pengamanan militer swasta dan munculnya PMCs, bentuk penyedia jasa pengamanan modern jenis baru tersebut.

Invasi militer Amerika Serikat ke Afganistan dan Iraq membawa peluang dalam dunia tentara bayaran atau kontraktor keamanan. Berdasarkan laporan *Congressional Research Service* Amerika Serikat pada 2013, terdapat 108.000 kontraktor keamanan swasta di Afghanistan dan 65.700 pasukan tentara Amerika Serikat. Jumlah tersebut menciptakan perbandingan bahwa terdapat 1,6 kontraktor keamanan dari PMC untuk setiap tentara Amerika Serikat (Francis, 2013). Dari jumlah 108.000 kontraktor keamanan, 30.000 diantaranya adalah Warga Negara Amerika Serikat (Bloomfield, 2013). Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 70.000 tenaga pengamanan swasta lainnya adalah kontraktor berkewarganegaraan non-Amerika Serikat atau dikenal dengan *Third National Countries* dimana warga Afrika Selatan juga merupakan kontraktor berstatus TNC di Iraq. Hal ini diperkuat dengan jumlah korban tewas berpaspor Afrika Selatan yang bekerja untuk PMC di Iraq dari tahun 2003 sampai 2010 berjumlah dua puluh tiga orang (Count, 2010).

Fenomena banyaknya warga Afrika Selatan yang pergi ke Iraq dan Afghanistan sebagai tenaga tentara bayaran atau kontraktor keamanan swasta, terdapat peristiwa lain yang melibatkan warga negara Afrika Selatan sebagai tentara bayaran. Peristiwa tersebut dikenal dengan Kudeta Wonga (*Wonga Coup*) yang terjadi pada tahun 2004 ketika Simon Mann bersama enam puluh sembilan tentara bayaran dari Afrika Selatan berencana untuk menggulingkan pemerintahan diktator Teodoro Obiang di Guinea Ekuatorial (Bofey, 2013). Skandal tersebut

turut membawa nama Sir Mark Thatcher, putra dari mantan Perdana Menteri Inggris Margareth Thatcher yang tinggal di Afrika Selatan itu divonis bersalah di bawah hukum RFMA karena ikut membiayai kudeta (The Guardians, 2004).

Melihat fakta munculnya kembali tentara bayaran dalam kemasan baru berbentuk kontraktor keamanan, pada bulan November 2007 Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki menyetujui undang-undang yang mengatur perekrutan Afrika Selatan untuk bekerja di daerah konflik bersenjata yang berlaku untuk kontraktor keamanan swasta di Irak bernama *The Prohibition of Mercenary Activities and Regulation of Certain Activities in Country of Armed Conflict Act* (PMAA). Afrika Selatan merupakan salah satu negara pertama di dunia yang secara efektif memblokir semua bentuk perekrutan tentara bayaran melalui undang-undang tersebut (IRIN, 2008).

Permasalahan eksistensi dan aktifitas tentara bayaran atau kontraktor keamanan dari Afrika Selatan merupakan salah satu fenomena yang menarik untuk dianalisis dalam ilmu hubungan internasional. Hal ini mengingat bagaimana tentara bayaran dapat mengubah dinamika perbatasan politik internasional dan mempengaruhi keamanan regional maupun global khususnya seperti yang ditunjukkan oleh *Executive Outcomes* dan peristiwa-peristiwa lain yang melibatkan tentara bayaran dari Afrika Selatan. Kendati terdapat fakta-fakta bahwa tentara bayaran dari Afrika Selatan berhasil mempengaruhi alur sejarah pemerintahan negara-negara di wilayah benua Afrika dan memunculkan berbagai hukum internasional karena implikasi keberadaannya, penulis lebih tertarik untuk membahas mengenai apa yang melatarbelakangi dirumuskannya Undang-Undang Anti-Tentara Bayaran 2007 sebagai produk kebijakan pemerintah Afrika Selatan yang menjadi tembok penanggulangan atas aktivitas ilegal yang dilakukan para tentara bayaran asal Afrika Selatan.

Berdasarkan peristiwa dan fakta-fakta di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya ke dalam sebuah karya ilmiah :

Penetapan Undang-Undang Anti – Tentara Bayaran Tahun 2007 di Republik Afrika Selatan

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan digunakan untuk memberi batasan pada pembahasan dalam karya tulis ilmiah agar fokus terhadap pokok permasalahan dan tidak meluas. Dalam ruang lingkup pembahasan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu batasan waktu dan batasan materi.

1.2.1 Batasan Waktu

Batasan waktu digunakan untuk menunjukkan rentang waktu peristiwa yang dianalisis. Dalam karya ilmiah ini peneliti menetapkan batasan waktu yaitu mulai tahun 2004-2007. Tahun 2004 merupakan tahun puncak keberangkatan warganegara sipil Afrika Selatan sebagai tentara bayaran di Iraq dan Afghanistan serta upaya kudeta di Guinea Khatulistiwa. Tahun 2007 dipilih karena Pemerintah Afrika Selatan merespon aktivitas tentara bayaran tersebut dengan menetapkan Undang-Undang PMAA.

1.2.2 Batasan Materi

Batasan materi berguna untuk menunjukkan ruang pembahasan sebuah peristiwa yang akan dianalisis. Dalam karya ilmiah ini, peneliti akan membatasi pada alasan yang mendasari Pemerintah Afrika Selatan dalam menetapkan Undang-Undang Anti Tentara Bayaran pada 2007.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini adalah **Mengapa pemerintah Afrika Selatan menetapkan Undang Undang Anti – Tentara Bayaran pada tahun 2007?**

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan dalam karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui alasan dan pertimbangan Republik Afrika Selatan terhadap kondisi dan realita yang melatarbelakangi dalam menetapkan Undang-Undang Anti Tentara Bayaran pada tahun 2007.

1.5 Landasan Konseptual dan Teoritis

Dalam penulisan karya ilmiah ini akan digunakan beberapa konsep yang dapat membantu untuk menjelaskan dan menganalisa permasalahan. Pemilihan dari konsep dalam penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas. Menurut Mohtar Mas'oeed konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu objek, sifat suatu objek atau suatu fenomena tertentu. Konsep adalah sebuah gagasan, bukan sesuatu yang asing digunakan dalam keseharian, yang digunakan untuk menyederhanakan kenyataan yang ada dengan mengkategorikan hal-hal yang ditemui dengan ciri yang relevan dengan kita (Mas'oeed, 1990).

1.5.1 Konsep *Private Military and Security Company* dan Tentara Bayaran

Private Military and Security Company atau dikenal dengan Jasa Pengamanan Militer Swasta merupakan salah satu aktor *non-state* yang aksinya cukup sering muncul dalam berita internasional kendati aktivitasnya berada di “bawah radar” atau rahasia. Penelitian akademis pada PMC merupakan hal yang penting untuk membantu para pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan mengenai perlunya penggunaan tenaga PMC dalam mencapai kepentingan nasional dan mendukung bantuan kemanusiaan di wilayah berbahaya atau wilayah konflik.

Private Military Company merupakan Organisasi swasta yang menyediakan jasa di bidang militer dan keamanan seperti jasa pengamanan bersenjata, pemeliharaan perlengkapan militer, layanan teknologi informasi, dan intelijen. Jasa dan keahlian yang ditawarkan oleh perusahaan jenis ini umumnya sama dengan apa yang menjadi tugas angkatan bersenjata atau polisi namun dengan cakupan yang terbatas. Meskipun praktik penggunaan tentara bayaran atau

mercenary telah lama dikenal, keberadaan *private military services* baru mengemuka pada awal 1990-an sejalan dengan semakin meningkatnya penggunaan jasa pengamanan swasta oleh negara dan perusahaan multinasional di wilayah konflik atau rawan konflik (Ashari, 2015, hal. 292). Perusahaan militer berbeda dari organisasi yang beroperasi di bidang industri keamanan lainnya karena mereka dirancang untuk memiliki dampak strategis terhadap keamanan dan lingkungan politik negara-negara lemah yang sedang menghadapi ancaman militer (Shearer, 1998).

PMC sendiri merupakan sebuah entitas dagang dengan struktur bisnis yang jelas dan secara terbuka mereka berkompetisi di pasar global untuk menyediakan jasa pada negara-negara, *Multinational Corporations*, institusi internasional, dan bahkan *non-governmental organization* (NGO). (Scheimer, 2009). Deskripsi tentang PMC tersebut membuat garis pembatas yang cukup jelas antara PMC dengan tentara bayaran yang aktivitasnya dilarang berdasarkan Artikel 47 Protokol I Tambahan Konvensi Jenewa 1977, Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa mengenai Tentara Bayaran pada 1989 dan Organisasi Kesatuan Afrika pada Konvensi Penghapusan Tentara Bayaran di Afrika pada 1977.

Tidak ada definisi baku dan absolut untuk menjelaskan tentang PMC. Para peneliti menggunakan tipologi dari jenis-jenis jasa yang ditawarkan oleh PMC untuk mengelompokkan jenis PMC. Carlos Ortiz, salah satu analis PMC mendefinisikan PMC sebagai perusahaan internasional yang sah secara hukum yang menawarkan jasa melibatkan penerapan kekerasan secara sistematis dan dengan cara militer atau paramiliter, serta peningkatan, transfer, memfasilitasi, pencegahan, atau melumpuhkan potensi (kekerasan) tersebut, atau pengetahuan yang dibutuhkan untuk menerapkan kekerasan tersistematis, kepada klien (Ortiz, 2010).

P. W. Singer, salah satu peneliti hubungan internasional mengklasifikasikan PMC menjadi tiga tipologi berdasarkan jasa yang ditawarkan (Singer P. W., 2003).

- a) tipe 1, PMC yang memfokuskan pada jasa taktis. Jasa yang ditawarkan berupa penyediaan personil militer untuk klien di garis terdepan

peperangan. Klien yang mengontrak PMC tipe 1 merupakan klien yang ingin agar PMC dapat menambah kekuatan militer karena kapabilitas militernya minimalis. Contoh dari PMC tipe 1 yang memiliki kemampuan bertempur adalah *Executives Outcome* dari Afrika Selatan.

b) tipe 2, PMC yang menawarkan jasa konsultasi dan pelatihan. Perusahaan jenis ini menawarkan jasa analisis strategi dan operasional untuk angkatan bersenjata. Para mantan personil militer berpengalaman yang pensiun lalu menjadi kontraktor di PMC banyak menawarkan jasa ini. *Military Professional Resources Inc.* (MPRI) dari Inggris merupakan salah satu perusahaan yang termasuk dalam tipe 2.

c) tipe 3, PMC tipe terakhir memberikan jasa yang jenisnya tidak berpartisipasi langsung dalam pengamanan atau pertempuran melainkan sebagai penunjang tugas-tugas tambahan seperti pelayanan teknis, transportasi, medis, dan logistik. Contoh dari PMC tipe ini diwakili oleh Halliburton.

Di sisi lain, tentara bayaran memiliki definisi sendiri yang dipandang kurang memadai dalam mendefinisikan tenaga pengamanan swasta modern ini. Beberapa hukum internasional menggolongkan *mercenary* atau tentara bayaran sebagai *unlawful combatant* sehingga dapat dihukum atas tindak kejahatan biasa. Penggunaan tentara bayaran telah dikenal lama dan praktik ini masih berlangsung di sejumlah negara. Meskipun demikian, sebagian besar negara menetapkan perekrutan dan penggunaan tentara bayaran sebagai tindakan melanggar hukum. (Ashari, 2015, hal. 292) *UN Mercenary Convention 1989* mendefinisikan *Mercenary* sebagai orang yang (a) direkrut secara khusus, baik di dalam negeri maupun luar negeri, untuk bertempur dalam konflik bersenjata; (b) memiliki motivasi bertempur untuk mendapatkan keuntungan berupa materi; (c) bukan warga negara yang terlibat dalam konflik atau penduduk di wilayah yang dikontrol oleh pihak dalam konflik; (d) bukan anggota angkatan bersenjata negara yang terlibat dalam konflik; dan (e) tidak dikirim dalam tugas resmi oleh negara ketiga yang tidak terlibat konflik.

Apabila merunut pada pendefinisian yang dilakukan oleh Republik Afrika Selatan dalam Undang- Undang Anti Tentara Bayaran I, “aktivitas tentara bayaran” diartikan sebagai partisipasi langsung sebagai seorang kombatan di wilayah konflik bersenjata untuk mendapatkan keuntungan pribadi. UU Anti-Tentara Bayaran I juga mendefinisikan jenis tugas- tugas “perbantuan militer asing” yang dikategorikan terlarang pada pasal 1 ayat iii yaitu jasa militer atau jasa yang berafiliasi dengan kegiatan militer, dengan berbagai cara, dorongan, hasutan, atau permintaan untuk memberikan layanan semacam itu, dalam bentuk. Tentara bayaran didefinisikan sebagai (Rep. South Africa, 1998):

Pasal

1. (iii) Seseorang yang melakukan “perbantuan militer asing” yang artinya jasa atau tugas yang berhubungan dengan militer, atau setiap upaya, dorongan, hasutan, atau ajakan untuk memberikan jasa yang berbentuk:
 - a) Bantuan militer pada suatu pihak dalam konflik bersenjata melalui
 - i. Bimbingan atau pelatihan;
 - ii. Personil, pembiayaan, logistik, intelijen, atau dukungan operasional;
 - iii. Perekrutan personil;
 - iv. Layanan medis atau paramedis;
 - v. Pengadaan peralatan;
 - b) Jasa keamanan untuk perlindungan individu yang terlibat dalam konflik bersenjata atau dalam properti mereka;
 - c) Tindakan apa pun yang ditujukan untuk menggulingkan pemerintahan atau merusak tatanan konstitusional, kedaulatan atau integritas teritorial suatu negara;
 - d) tindakan lain yang merupakan hasil dari memajukan kepentingan militer dari suatu pihak

lain dalam konflik bersenjata, tetapi bukan kegiatan bantuan kemanusiaan atau sipil yang bertujuan untuk meringankan penderitaan warga sipil di daerah konflik bersenjata.

Konsep PMC milik P. W. Singer dan definisi tentara bayaran dari UU Anti Tentara Bayaran I yang ditetapkan Republik Afrika Selatan pada 1998 menjadi acuan untuk membantu penulis dalam menganalisis tentang bagaimana Pemerintah Republik Afrika Selatan merumuskan definisi yang lebih memadai mengenai tentara bayaran yang telah diperbarui melalui Undang-Undang PMAA 2007. UU Anti- Tentara Bayaran yang diperbarui ini berfungsi sebagai pengisi celah di UU Anti- Tentara Bayaran sebelumnya yaitu RFMA 1998 melalui penambahan definisi-definisi teknis PMC.

1.5.2 **Dinamika Pasar dan Gangguan Keamanan Global**

Keberadaan industri militer swasta memunculkan argumen bahwa negara (*States*) dan aktor non-negara (*non-state actor*) memiliki akses terhadap kemampuan militer dan kekerasan yang sebelumnya hanya dimiliki oleh negara. Pada negara-negara yang memiliki kedaulatan dan struktur yang lemah, PMC dapat dengan mudah menantang kedaulatan pemerintah lokal dengan kemampuan kekerasan yang dimiliki oleh PMC atau tentara bayaran. Meskipun pandangan akan kekerasan melekat pada PMC, mereka juga memiliki kemampuan untuk membantu negara-negara yang sedang dilanda konflik (Singer P. W., hal. 170).

Aspek penting lainnya dari bangkitnya industri militer swasta adalah keterbukaan pada calon pengguna jasa. Hal ini mengakibatkan kelompok *non-state actor* yang sebelumnya tidak memiliki kemampuan kompetitif di dalam sistem struktur keamanan yang secara tradisional dikuasai oleh negara, kini memiliki kemampuan opsi mobilisasi kekuatan dan akses terhadap kekuasaan. Dalam dunia politik, individu dan kelompok-kelompok sangat tergantung pada negara sebagai pemegang yurisdiksi mobilisasi kekerasan, kini kemampuan dalam

mengakses dan menggunakan jasa kekerasan dan militer tersedia di pasar global. (Singer P. W., hal. 180)

Hal ini yang menjadi pertimbangan pemerintah Afrika Selatan dalam merumuskan Undang-Undang baru Anti-Tentara Bayaran pada 2007. Keberadaan mereka dapat mengganggu keamanan regional dan bahkan parlemen Afrika Selatan sendiri ingin membatasi kemampuan akses pasar terhadap jasa keamanan dan kekerasan yang sewaktu-waktu justru dapat membahayakan keamanan internal Afrika Selatan apabila suatu saat ada PMC yang dikontrak untuk membahayakan keamanan domestik seperti yang sudah terjadi dengan negara-negara regional Afrika dimana struktur keamanan negara-negara tersebut terancam oleh tentara bayaran dari Afrika Selatan.

Menurut Christopher Kinsey (2006), terdapat beberapa alasan mengapa PMC harus diregulasi, diantaranya adalah alasan untuk menjamin bahwa mereka tidak mengganggu kedaulatan negara, mencegah kerusakan perekonomian yang disebabkan oleh tentara bayaran pada klien mereka, dan guna memastikan tidak adanya akibat buruk yang ditimbulkan untuk perdamaian, keamanan, dan resolusi konflik.

Di sisi lain, kemampuan keamanan domestik Afrika Selatan mengalami penurunan seiring banyaknya tentara maupun polisi dan satuan tugas elit yang lebih memilih bekerja sebagai PMC di Iraq atau pun di regional Afrika sendiri. Hampir setidaknya enam puluh persen anggota kesatuan khusus keamanan Afrika Selatan memilih pergi ke Iraq dan bekerja sebagai kontraktor keamanan di sana (Hosken, 2004). Pemerintah Afrika Selatan berusaha untuk melindungi keamanan domestiknya dari ancaman eksternal dengan adanya undang-undang anti-tentara bayaran. Faktor finansial dalam pasar penyedia jasa keamanan dan kekerasan yang dapat meluluhkan warga negara Afrika Selatan yang bertugas untuk satuan keamanan negara dipandang sebagai ancaman karena dapat mengurangi kemampuan pertahanan domestik yang justru bisa membahayakan pemerintah Afrika Selatan dan dapat dimanfaatkan oleh tentara-tentara bayaran yang disewa oleh aktor non-negara yang tidak bertanggung jawab atau bahkan negara yang berbatasan dengan Afrika Selatan sendiri.

1.6 Argumen Utama

Berdasarkan pemilihan konsep yang dipilih oleh penulis, maka penulis mengambil argumen utama bahwa keputusan Pemerintah Republik Afrika Selatan menetapkan UU Anti-Tentara Bayaran pada 2007 merupakan usaha Pemerintah Afrika Selatan untuk menutup celah definisi tentang PMC dan tentara bayaran secara khusus pada undang-undang sebelumnya, RFMA 1998. Ditetapkannya PMAA 2007 sebagai Undang-Undang Anti-Tentara Bayaran yang baru juga bertujuan untuk melarang total aktivitas tentara bayaran dan meregulasi secara ketat aktivitas yang serupa di wilayah konflik.

1.7 Metode penelitian

Dalam penulisan suatu karya ilmiah diperlukan adanya metode yang jelas untuk membantu menganalisa dan menjawab suatu permasalahan. Metode merupakan teknik atau cara yang digunakan untuk mengungkap hubungan antar konsep dengan data-data. Dalam hal ini, metode penelitian yang akan digunakan dikelompokkan menjadi dua, yaitu metode pengumpulan data dan metode analisis data.

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan fondasi dalam penelitian. (Yin, 2011). Data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah dapat diperoleh dengan metode-metode tertentu, Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, sumber, dan cara (Sugiyono, 2008). Jika dilihat dari sumber data, dapat dibedakan menjadi sumber data primer dan sekunder, dimana sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pada penelitian ini, sumber data yang diperoleh yaitu data sekunder, karena teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau melakukan observasi secara tidak langsung. Pengumpulan tersebut diperoleh melalui:

1. Perpustakaan Pusat, Universitas Jember

2. Ruang Baca FISIP, Universitas Jember
3. Surat kabar dan media cetak lainnya
4. Jurnal dan artikel
5. Koleksi pribadi
6. Media internet

1.7.2 Metode Analisis Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif merupakan cara untuk mengkaji permasalahan dengan penggambaran untuk memahami perilaku objek yang akan diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif. Pada metode kualitatif ini data yang dianalisa hanya bersifat menggambarkan, menjelaskan, dan memaparkan suatu fenomena secara riil dan apa adanya. Dimana pada penelitian kualitatif objek yang akan diteliti bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga peneliti akan meneliti keseluruhan situasi sosial yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2008).

Metode berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deduktif. Deduktif merupakan teknik berpikir dari pernyataan yang bersifat umum berupa data dan fakta yang telah terkumpul kemudian didapatkan hasil yang bersifat khusus berupa kesimpulan.

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam usaha mempermudah penulisan karya ilmiah ini, peneliti akan membaginya ke dalam lima bab dimana pada setiap bab akan terdiri dari sub bab yang saling berhubungan. Sistematika penulisan dari bab-bab tersebut sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini akan membahas tentang Latar Belakang, Ruang Lingkup Pembahasan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori, Argumen Utama, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tentara Bayaran dari Afrika Selatan

Dalam bab ini, peneliti akan membahas mengenai lahirnya tentara bayaran di kawasan Afrika dan Afrika Selatan khususnya serta perkembangannya hingga berevolusi menjadi *Private Military Company*. Penjelasan mengenai bagaimana tentara bayaran mempengaruhi dinamika politik dan keamanan benua Afrika akan dibahas dalam bab ini.

Bab III Kegagalan UU Anti-Tentara Bayaran I Tahun 1998

Pada bab ini akan menganalisis tentang pengaplikasian UU Anti-Tentara Bayaran RFMA 1998 yang ditetapkan oleh Afrika Selatan dan analisis keefektifan RFMA dalam membatasi aktivitas kontraktor keamanan yang masih menjalankan aktivitasnya.

Bab IV Analisis Faktor yang Mendasari Penetapan Undang-Undang Anti-Tentara Bayaran II Tahun 2007 oleh Pemerintah Republik Afrika Selatan

Bab ini akan menjawab pertanyaan pada rumusan masalah pada penelitian ini yaitu aspek-aspek yang mendasari pemerintah Afrika Selatan memandang tentara bayaran sebagai ancaman terhadap dinamika keamanan dengan menetapkan Undang Undang Anti – Tentara Bayaran pada tahun 2007.

Bab V Kesimpulan

Bab ini merupakan kesimpulan dari uraian yang telah disebutkan dan dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya.

BAB 2. TENTARA BAYARAN DARI AFRIKA SELATAN

Tentara bayaran memiliki sejarah panjang yang beriringan dengan peperangan dalam peradaban manusia. Hampir dapat dipastikan bahwa di setiap peperangan kuno selalu terdapat eksistensi tentara bayaran yang turut bertempur dan dibayar oleh penguasa. Keberadaan tentara pejuang dapat dilacak sejak masa pemerintahan Raja Ramses II di Mesir yang membayar suku-suku di benua Afrika untuk menjadi pasukannya, bukan demi loyalitas pada kerajaan tapi demi mengejar kemakmuran sebagai tentara yg ditawarkan kerajaan Mesir kuno. Dari era peradaban klasik manusia, tentara bayaran terus berkembang sampai era modern peradaban. Di setiap peperangan baik itu peperangan antar bangsa sampai peperangan kecil antar etnis dalam sejarah manusia sudah dapat dipastikan terdapat campur tangan tentara bayaran.

2.1 Gambaran Umum Tentara Bayaran

Penulis membagi runtutan sejarah keberadaan tentara bayaran ke dalam dua periode sejarah manusia, yaitu gambaran tentara bayaran di era periode klasik dan pada era periode modern. Pembagian periode mengenai gambaran umum tentara bayaran berfungsi agar dapat menjelaskan evolusi tentara bayaran lebih mudah dan perbedaan jenis-jenisnya di setiap periode sejarah.

2.1.1 Periode Klasik

Sejarah manusia pada periode klasik mencatat tulisan pertama mengenai peperangan dimana tentara bayaran menunjukkan eksistensinya adalah ketika Raja Kadesh dari bangsa Mitani (Syria modern) mengajak suku-suku di sekitar kerajaan menjadi pasukannya untuk menantang Kerajaan Mesir pada tahun 1479 Sebelum Masehi. Pasukan bangsa Mitani akhirnya dikalahkan oleh dua puluh lima ribu pasukan kerajaan Mesir dibawah kekuasaan Raja Thutmose III. (Lanning, 2005). Kerajaan Mesir Kuno pun tak mau kalah dengan turut

mempekerjakan bangsa Nubian dari Afrika Utara dan tentara bayaran terlatih dari Yunani.

Bangsa Yunani sendiri merupakan kata yang muncul beriringan dengan kata tentara bayaran dalam konteks periode klasik. Dikenal sebagai bangsa yang mengandalkan kemampuan bertempur dan atletik, bangsa Yunani menyediakan kelompok pria sebagai tentara untuk kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Hampir semua peperangan di wilayah Mediterania terdapat partisipasi tentara bayaran Yunani bahkan kebanyakan peperangan memiliki tentara bayaran asal Yunani yang saling bertempur untuk kedua pihak. Peperangan antara Yunani dan Persia turut menyertakan tentara bayaran dari Yunani yang justru bertarung untuk Persia dan menginvasi bangsanya sendiri.

Setelah era peradaban kuno (*ancient*), pada abad pertengahan (*middle age*) muncul legiun tentara bayaran yang lahir di Inggris dan beroperasi di Perancis serta Italia yang dipimpin John Blackwood bernama Kompi Putih (*White Company*). Kompi Putih terdiri dari tentara berbagai bangsa, sebagian besar dari Inggris, Jerman, dan Perancis (Caffero, 2006). Kelompok Kompi Putih diperhitungkan dalam sejarah sebagai prajurit bayaran pertama yang benar-benar bekerja di luar otoritas pemerintahan kerajaan. Tidak hanya itu, para prajurit ini juga mengambil keuntungan pribadinya langsung seperti perusahaan pribadi setelah melaksanakan tugasnya, tidak seperti prajurit kerajaan yang dianggap sebagai alat kebijakan luar negeri kerajaan dalam peperangan. Saat mereka berperang untuk kerajaan tertentu, keberadaan mereka menjadi resmi, namun ketika sedang tidak bertempur keberadaan mereka dianggap sebagai bandit atau kriminal.

Pada masa Kompi Putih beroperasi di Italia, Niccolo Macchiavelli menuliskan tentang eksistensi mereka yang dianggap buruk. Ia menuliskan dalam bukunya Sang Pangeran (Macchiavelli, 1532) :

“Tentara bayaran dan para pembantunya sangat berbahaya dan tidak berguna. Jika seseorang menjalankan pemerintahan menggunakan senjata mereka, maka ia tidak akan berdiri dengan teguh dan merasa aman; mereka adalah kelompok yang terpecah-belah, tidak disiplin dan ambisius, tidak setia, gagah di depan teman dan pengecut di depan musuh. ... faktanya, mereka tidak

memiliki daya tarik atau alasan lain untuk mempertahankan ladangnya daripada sedikit gaji, yang tidak cukup untuk membuat mereka mati untukmu”.

Tidak semua setuju dengan Macchiaveli, Thomas More dalam *Utopia* (More, 1516) menganggap mempekerjakan tentara bayaran membawa dua manfaat. Pertama, dengan menyewa tentara bayaran maka akan menjauhkan para utopis dari kegiatan yang berbahaya. Alasan kedua adalah ekonomi, hanya sedikit dari tentara bayaran yang menyelesaikan peperangan yang hebat dan jumlah sedikit itu yang nanti mendapatkan bayaran. Kebanyakan dari tentara bayaran pada masa itu adalah sampah masyarakat, kehilangan mereka di pertempuran justru dianggap tidak berpengaruh buruk.



Gambar 2.1. The Pontifical Swiss Guard, unit militer Vatikan
Sumber: (Williams, 2006)

Periode abad pertengahan juga diisi dengan kemasyhuran kehebatan tentara bayaran dari Swiss Guard yang menguasai pertempuran di Eropa selama dua abad. Tentara bayaran Swiss yang kemudian hari menjadi unit militer resmi secara *de facto* bernama *The Pontifical Swiss Guard* masih menjadi penjaga pemimpin umat Katolik, Paus di Vatikan hingga masa modern ini. Tugas mereka selain menjaga Vatikan adalah menjadi pengawal khusus pemimpin agama Katolik, Paus di Vatikan maupun ketika beliau bepergian ke seluruh dunia.

Abad pertengahan juga memiliki sejarah tentara bayaran tentang kongsi dagang. Kongsi dagang paling terkenal adalah Perusahaan Dagang India Timur Belanda atau yang biasa dikenal dengan VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) dan Perusahaan Hindia Timur Inggris atau East India Company.

Kongsi-kongsi dagang tersebut diberikan kekuasaan lebih untuk menjalankan perdagangan dan membentuk prajurit di negara koloni oleh negara yang diwakilkan. Kongsi Dagang yang berjaya pada abad ke-16 merupakan refleksi dari PMC di era modern. Pemberian kekuasaan berlebih atas kemampuan melakukan kekerasan pada sebuah organisasi non-pemerintah dapat membahayakan untuk negara itu sendiri. Kedua kongsi dagang tersebut sering melakukan perang di negara koloni meskipun negara pemberi kuasa tidak memerintahkannya. Kongsi dagang kehilangan kekuasaannya pada akhir abad 19 karena sering bermasalah dengan negara pemberi kuasanya (Holmila, 2012).

Praktek tentara bayaran berakhir pada pertengahan abad ke-19. Menurut Sarah Percy dalam bukunya *Mercenaries: The History of a Norm in International Relations*, menjelaskan bahwa praktek tentara bayaran berakhir karena munculnya norma anti-tentara bayaran yang berdasarkan pada moral patriotisme dan nasionalisme yang sedang meningkat. Motif finansial dipandang sebagai hal yang tabu (Percy, 2007).

Pasca terjadinya Perang Tiga Puluh Tahun yang membelah negara-negara Eropa dan diakhiri dengan perjanjian damai Westphalia pada 1648, muncul jenis tentara baru yakni seperti yang Kiernan sebut, organisasi angkatan bersenjata “tentara bayaran-nasional” (Kiernan, 1957). Jenis tentara model baru tersebut memasukan tentara asing ke dalam tentara nasionalnya dan akan terdaftar secara permanen. Pada saat itu gabungan tentara tersebut adalah antara Perancis dan Swiss namun kemudian menyebar ke seluruh negara-negara Eropa. Pada pertengahan 1700-an, model tentara jenis ini diadopsi oleh negara dan kerajaan Prussia, Inggris, Perancis, dan Spanyol. Sebagai contoh pengaplikasian tentara bayaran-nasional, Inggris menggunakan jasa tentara bayaran Hessian dari Jerman ketika terjadi Perang Revolusi Amerika.

Revolusi Perancis turut mengubah tatanan sosial masyarakat dan pandangannya terhadap tentara bayaran pada akhir abad 18. Revolusi Perancis melahirkan Deklarasi Hak Manusia dan Warga Negara (*Declaration of The Rights of The Man and The Citizen*) pada 1789 yang meruntuhkan feodalisme dan menjunjung hak fundamental manusia dan warga negara. Deklarasi tersebut

menuntut dibentuknya angkatan bersenjata negara. Warga negara Perancis yang berusia dua puluh tahun wajib mendaftarkan diri sebagai peserta wajib militer yang kemudian akan ditetapkan sebagai anggota angkatan bersenjata negara dan pelarangan adanya tentara penjaga pribadi oleh individu serta adanya tentara asing tanpa permintaan parlemen sebagai pemegang kewenangan. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa (Holmila, hal. 64):

“Hak atas keamanan atas manusia dan atas warga negara membutuhkan kekuatan militer negara. Kekuatan militer ini, maka dari itu dibentuk untuk kebaikan untuk semua dan tidak hanya untuk keuntungan pribadi dari mereka yang yang tidak dapat dipercaya.”

Peristiwa besar yang terjadi sepanjang sejarah turut mempengaruhi bagaimana dunia memandang tentara bayaran. Pasca Revolusi Perancis, praktis hampir dua ratus tahun aktivitas tentara bayaran berkurang drastis karena bangkitnya penggunaan tentara nasional karena pandangan bahwa tentara bayaran tidak loyal dan hanya mengejar keuntungan pribadi. Perspektif ini tidak berubah sampai saat ini.

2.1.2 Periode Modern

Setelah Perang Dunia II, praktek tentara bayaran nyaris tidak terdengar keberadaannya. Inggris pasca Perang Dunia II yang masih menggunakan tentara bayaran untuk mempertahankan pengaruh atas koloni kerajaannya. Inggris tercatat cukup aktif dalam melaksanakan kebijakan luar negerinya dengan menggunakan tentara bayaran seperti pada operasi-operasi militer yang dilakukan di Yaman, Libya, dan di Perang Saudara Angola. Para tentara bayaran Inggris merupakan mantan anggota pasukan khusus pada Perang Dunia II dan tentara Gurkha yang direkrut khusus oleh Inggris dari Kerajaan Nepal.

Gurkha Merupakan tentara tradisional Kerajaan Nepal yang digabungkan dalam struktur angkatan bersenjata khusus Kerajaan Inggris sebagai tentara bayaran dengan nama Regiment Gurkha Rifle. Bahkan hingga saat ini, mereka diposisikan sebagai tentara legiun asing oleh Inggris. Kebanyakan mantan prajurit Gurkha yang pensiun akan direkrut oleh perusahaan penyedia jasa keamanan untuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Inggris (Angkasa).

Pada akhir tahun 1960-an, *Watch Guard International* didirikan oleh Kolonel Sir David Stirling yang juga pendiri unit pasukan khusus dalam Angkatan Darat Inggris, *British Special Air Services* (SAS). Anggota *WatchGuard International* juga direkrut dari para mantan anggota SAS yang kemudian bertugas melatih unit pasukan khusus Kesultanan Teluk Persia serta sebagai pemberi dukungan bantuan untuk operasi-operasi pembersihan gerakan pemberontak. *Watch Guard International* ini yang kemudian di masa depan menjadi model untuk terbentuknya PMC. Operasi *Watch Guard International* tidak hanya berkegiatan di Timur Tengah namun juga sampai Benua Afrika, seperti di Zambia dan Sierra Leone. *Sir Stirling* juga membentuk *KAS Enterprise* yang bermarkas di Pretoria sebagai pelaksana operasi anti-perburuan ilegal yang bekerjasama dengan SADF dan *World Wildlife Federation* (Musah & Fayemi, hal. 46-47).

Era kontraktor keamanan memasuki babak baru dalam dunia bisnis yang mengantarkan pada tren baru dimana mereka dikontrak dalam peperangan skala besar oleh Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada saat terjadinya Perang Vietnam mengembangkan peran kontraktor keamanan ke dalam lima area: operasional markas; pembangunan proyek; pengelolaan penyimpanan air dan operasional transportasi darat; suplai bahan bakar minyak; serta pemeliharaan dan dukungan teknis untuk sistem penerbangan dan sistem teknologi tinggi (Cotton, et al., 2010). Pada dekade 1970-an, bisnis keamanan swasta berkembang di bawah globalisasi dan ancaman dari terorisme. Bisnis penasihat keamanan marak pada tahun 1970-an karena faksi-faksi teroris tumbuh di berbagai negara. Perusahaan multinasional menyewa penasihat keamanan untuk mengantisipasi serangan terorisme pada para pegawainya. Era 1970-an menjadi acuan dimana sektor komersial turut meramaikan bisnis kontraktor keamanan dan menjadi tonggak atas aktivitas yang serupa di masa depan dimana perusahaan besar menyewa kontraktor keamanan untuk melindungi perusahaannya.

Konsep penyedia jasa keamanan yang berkapabilitas militer terorganisir mulai dikenal sebagai *Private Military Company* pada 1990-an atau ketika terjadi Perang Teluk yang melibatkan Amerika Serikat, Iraq, dan Kuwait. Amerika

Serikat mengerek secara masif alihdaya tugas militer pada pihak sipil swasta pasca Perang Dingin yang mengakibatkan penurunan jumlah pasukan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat itu sendiri. Selama Perang Teluk I pada 1991, ratio perbandingan kontraktor keamanan terhadap personil militer AS adalah satu banding lima puluh dan jumlahnya naik menjadi 1 banding 10 personil saat intervensi militer AS pada konflik etnis Bosnia-Herzegovina dan Kosovo pada pertengahan 1990-an hingga 1999. Jumlah tersebut setara dengan Perang Iraq yang terjadi pada awal tahun 2000-an (Avant, Think Again: Mercenaries, 2009).

Penggunaan pihak-pihak dari luar pemerintahan sebagai bagian dari elemen dalam peperangan serta pengamanan tidak lepas dari bentuk baru praktek kekerasan yaitu Pertempuran Baru (*New Wars*) yang dikemukakan oleh Mary Kaldor. Menurut Kaldor, Pertempuran Baru merupakan jenis praktek kekerasan terorganisir yang berkembang pada tahun 1990-an di Afrika (Kaldor, 2002). *New Wars* atau Pertempuran Baru tidak mempertemukan kedua pihak prajurit yang berperan di satu medan tempur seperti pada jenis pertempuran lama, melainkan pertempuran bisa terjadi di mana saja seperti di perkotaan atau perkampungan.

Dalam *New Wars* atau Pertempuran Baru, kekejaman atau kejahatan perang adalah hal yang lumrah. Kejahatan perang seperti merubuhkan bangunan bersejarah, menyerang non-kombatan, dan pembunuhan massal warga sipil adalah bagian dari Pertempuran Baru. Ironisnya, kekejaman dalam kejahatan perang merupakan kebalikan dari bagaimana negara modern berkembang. Hal ini berimplikasi pada munculnya permasalahan krisis kemanusiaan. Negara yang hancur oleh peperangan dan menghadapi krisis kemanusiaan setelahnya cenderung membutuhkan pihak-pihak dari berbagai sektor untuk bekerjasama. Kerjasama tersebut menghasilkan jaringan yang saling silang antar pemerintahan dan aktor-aktor non-pemerintahan hingga lembaga supranasional seperti PBB (Kaldor, hal. 5). Iraq dan Afghanistan merupakan contoh nyata bagaimana akhir peperangan menghasilkan krisis kemanusiaan dan pemerintahan terkait menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan pemerintahan untuk membangun kembali negaranya dan menjaga kestabilan keamanan negara pasca perang.

Amerika Serikat telah menyerahkan tugas-tugas keamanan pada sektor swasta, yaitu PMC.

Kestabilan pertahanan negara pasca perang dapat diraih dengan apa yang disebut dengan *Strategic Complex*. *Strategic Complex* merupakan sebuah program yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dunia dengan menyediakan kestabilan dan keamanan untuk negara-negara yang berbahaya di berbagai belahan dunia. Pihak-pihak yang terlibat adalah pemerintah, organisasi internasional, lembaga sosial, perusahaan militer, *private military companies*, dan sektor bisnis. *Strategic Complex* membuka ruang untuk bekerjasama dengan *Private Military Company*. Kemampuan pengamanan yang dimiliki oleh PMC menjadi hal yang esensial dalam formula *Strategic Complex*. Diantara aktor pendukung lain, PMC menjadi aktor terdepan yang diandalkan dalam *Strategic Complex*. Hal ini dikarenakan anggota PMC memiliki kecakapan militer dan mayoritas anggotanya adalah mantan pasukan bersenjata dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris dan Perancis (Kinsey, 2006).

2.2 Tentara Bayaran Afrika Selatan

Praktek tentara bayaran di Benua Afrika diawali pada tahun 1960-an ketika beberapa individu menjadi pembunuh bayaran. Terdapat beberapa nama pemimpin bayaran terkenal yang menjelajahi Benua Afrika diantaranya Bob Denard (Gilbert Bourgeaud), Callan, “Si Gila” Mike Hoare, Jacques ‘Black Jack’ Schramme. Nama-nama tersebut dikontrak oleh beberapa pihak eksternal dan mantan penjajah kolonial yang bertanggungjawab atas kekacauan di Aljazair pada 1956, Kongo (1960-an), Kepulauan Komoro (1970 sampai 1990-an), Benin (1970) untuk mengganggu kestabilan politik negara-negara berdaulat tersebut. Tercatat juga bahwa mereka membunuh beberapa kepala negara (Lumumba di Kongo dan Ahmed Abdallah di Kepulauan Komoro) serta melakukan kudeta. (Musah & Fayemi, 2000)

Sejak Executives Outcomes, PMC dari Afrika Selatan muncul pada 1992 di Angola, fokus masyarakat dunia tertuju pada mereka terutama pada kemampuan EO dalam mengacaukan atau justru memberikan kestabilan

keamanan dalam pemerintahan sebuah negara. Perhatian masyarakat internasional pada aktivitas tentara bayaran di benua Afrika meningkat pasca Perang Dingin yang dikarenakan beberapa alasan. Pertama, peran perusahaan seperti Executive Outcomes memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas keamanan benua Afrika. Kedua, PMC mengisi kekosongan peran komunitas internasional dalam membantu negara-negara berkembang dengan mengirimkan tentara nasionalnya pada negara-negara tersebut. PMC sering juga dikritik karena hanya memberikan jasanya dalam jangka pendek saja tanpa menyiapkan dasar infrastruktur untuk jangka panjang. Terakhir, fakta bahwa kebanyakan perusahaan keamanan dikontrak oleh perusahaan swasta yang memiliki sedikit kepentingan, memicu pada kritik yang berkelanjutan (Buchner, 2007).

Executives Outcomes dipandang sebagai aktor utama dalam sepak terjang tentara bayaran atau tentara swasta karena EO merupakan entitas baru dalam dunia tentara bayaran. Berawal pada tahun 1990, Simon Mann menjalin kontak dengan pengusaha minyak Tony Buckingham, keduanya. Bersama-sama mereka membentuk Executive Outcomes, kelompok tentara bayaran modern yang memasarkan bakat dan keterampilan teman-teman dan mantan rekan kerja mereka. Dari kantor mereka di 535 King's Road, pasangan ini menjalankan bisnis yang memiliki kepentingan dalam pertambangan minyak, emas dan berlian, praktik akuntansi terdaftar, dan jasa manajemen keuangan lepas pantai (Buncombe & Basildon, 2004). EO mulai merambah pada bisnis pengamanan pribadi berskala militer pada saat terjadi perang saudara di Angola dan Sierra Leone, mengambil alih peperangan dengan cara mengintervensi pihak yang saling berkonflik dan memenangkan salah satu sisi yang membayar EO. Tidak seperti para tentara bayaran pendahulunya, yang berjaya di Afrika pada awal 1960-an, EO beroperasi secara lebih terorganisir dan profesional.

Mereka yang bekerja untuk Executives Outcomes adalah yang terbaik di bidangnya. Beranggotakan mantan tentara khusus dari unit militer Afrika Selatan dari era Apartheid yaitu Batalion 32 dan Koevoet, para tentara tersebut adalah unit khusus yang bertindak dalam operasi melawan pemberontakan di Namibia. Direktur Pengarah operasi tersebut bernama Eeben Barlow dan Lafras Luittingh.

EO sukses menyingkirkan pemberontak *National Union for the Total Independence of Angola* (UNITA) di Angola dan menyerahkan peralihan kekuasaan kembali ke pemerintah dengan cepat yang mengakibatkan pemerintah Angola memberikan kontrak pengamanan berjumlah 40 juta Dollar. Pasca sukses di Angola, EO mencari peluang di Sierra Leone yang sedang mengalami perang saudara dengan faksi pemberontak *Revolutionary United Front* (RUF) pada tahun 1995. EO juga bekerjasama dengan instansi-instansi atau badan perbantuan sipil dan pemerintah dalam mengembalikan kehidupan sipil tentara anak-anak yang direkrut oleh RUF, membantu pengembalian pengungsi, perbantuan kelogistikan dan dukungan dalam bentuk informasi intelijen untuk organisasi kemanusiaan. Meskipun dipandang memiliki kontribusi positif, beberapa akademisi melihat EO sebagai gejala kegagalan komunitas internasional dimana terdapat kekosongan peran oleh PBB dan Uni Afrika (Ashworth, 1996). PBB dan Uni Afrika terlihat gagal dalam mengisi kekosongan peran pengamanan dan kontrol atas konflik berskala perang sipil yang terjadi di benua Afrika di tahun 1990an.

EO merupakan sebuah solusi yang efektif diantara berbagai solusi lainnya bagi negara-negara Afrika yang sedang mengalami perang sipil pada 1990an, tidak heran bahwa nilai kontrak mereka yang dibebankan pada pemerintah yang mengontrak sangat tinggi. Kemampuan dukungan udara dari EO merupakan hal yang dihargai tinggi. Di Angola dan Sierra Leones, EO mengoperasikan dua Boeing 727 masing-masing seharga \$500.000, helikopter tempur-angkut Soviet Mi-17, helikopter tempur Mi-24, jet pembom Mig-23, dan pesawat latih pilatus dari Swiss. Biaya operasional untuk helikopter mencapai \$5000 per jam. Sedangkan untuk biaya gaji prajurit berkisar di angka \$2.000 per bulan, sementara unit khusus EO seperti pilot mendapatkan bayaran di atas \$5000. Angka tersebut merupakan tiga kali lipat dari gaji yang mereka terima ketika masih di militer Afrika Selatan (McNeil Jr.).

Tabel 2.1. Daftar Negara Pemberi Kontrak Executives Outcomes

Tahun	Negara	Kontrak Internasional
1990	Afrika Selatan	Pelatihan untuk Pasukan Khusus dan Paramiliter
1991	Botswana	Pengintaian Rahasia untuk De Beers (Perusahaan Berlian)
1991	Namibia	Pengintaian Rahasia untuk De Beers (Perusahaan Berlian)
1992	Angola	Merebut Peralatan Tambang Minyak di Soyo dari pemberontak UNITA rebels
1993	Angola	<input type="checkbox"/> Perlindungan tambang berlian di Canfunfo, Lunda Norte <input type="checkbox"/> Pelaksanaan latihan militer untuk Brigade Ke-16 Forcas Armadas Angolanas (FAA) <input type="checkbox"/> Melaksanakan latihan militer umum (putus kontrak pada Januari 1997) <input type="checkbox"/> Melaksanakan operasi militer perlawanan pada UNITA
1994	Angola	Melaksanakan bantuan logistik dan udara untuk FAA
1995	Sierra Leone	<input type="checkbox"/> Bantuan militer untuk Presiden Valentine Strasser melawan pemberontakan RUF (operasi tempur dan pelatihan militer) <input type="checkbox"/> Perlindungan tambang berlian Kono
1995	Kenya	Melakukan kongsi bisnis: Perusahaan Konsultan Keamanan
1995-97	<input type="checkbox"/> Malawi <input type="checkbox"/> Mozambique <input type="checkbox"/> Uganda <input type="checkbox"/> Zambia	Proyek pelatihan militer (dirahasiakan)
1996	Sierra Leone	<input type="checkbox"/> Ekspansi dari kontrak sebelumnya tahun 1995 <input type="checkbox"/> Penumpasan pemberontakan RUF, memfasilitasi negosiasi perdamaian and pemilihan umum. <input type="checkbox"/> Perlindungan keamanan untuk fasilitas pertambangan
1997	Zaire	

Sumber: (Security G. , Global Security Web Site, 2017)

Tabel di atas menunjukkan negara tempat Executives Outcomes beroperasi dan deskripsi jenis kontrak yang negara berikan pada EO sejak tahun 1990 yang diawali dari pelatihan militer domestik untuk negara rumah EO itu sendiri yaitu

Afrika Selatan. EO melakukan dukungan operasi militer langsung pertama di Angola dan dilanjutkan di Sierra Leone yang berakhir dengan kesuksesan dalam mengembalikan pemerintahan dari tangan pemberontak UNITA di Angola dan RUF di Sierra Leone. Pada 1998, pemerintah Afrika Selatan mengeluarkan undang-undang untuk membatasi operasi Executives Outcomes di luar negeri bernama Regulation of Foreign Military Assistance Act (RFMA). RFMA menjadi tembok untuk warga negara Afrika Selatan yang bekerja di luar negeri sebagai tenaga pengamanan. EO membubarkan diri setelah sukses beroperasi di benua Afrika pada tahun 1998.

Keberadaan PMC memudar di Afrika Selatan pada awal tahun 2000 namun tidak berlangsung lama. Perang terhadap terorisme di Iraq dan Afghanistan yang diluncurkan oleh Amerika Serikat dan pasukan koalisi memicu tingkat permintaan atas dukungan teknis sipil ahli di bidang militer yang kemudian diisi oleh *private military and security company*. PMSC yang berkembang saat ini merupakan representasi dari evolusi aktor-aktor swasta dalam peperangan, namun secara fundamental mereka berbeda. Faktor penting dalam menganalisa PMSC adalah bentuk korporat bisnis mereka. PMSC secara hirarki terorganisasi menjadi perusahaan dagang legal yang bersaing secara terbuka dalam pasar global, terhubung dengan pemegang saham dari luar, merekrut secara efisien daripada pendahulunya, menyuguhkan berbagai varian jasa militer lebih banyak ke berbagai banyak jenis klien. Bentuk PMSC sebagai korporat saat ini tidak hanya membedakan PMSC dengan tentara bayaran dan berbagai bentuk atau jenis perusahaan militer swasta lainnya, tapi juga menawarkan efisiensi dan efektivitas sebagai keunggulannya (Singer P. W., 2001).

Perang Melawan Teror Global yang diluncurkan oleh Amerika Serikat kepada Iraq dan Afghanistan memberikan panggung baru untuk PMC. Perusahaan PMC berskala kecil seperti Gray Security mulai bermunculan di Afrika Selatan untuk memberangkatkan pekerjanya. Perusahaan internasional seperti *Hart Security, Global Risk Strategies, Dyncorp*, dan *Olive Security* juga mulai melirik kontraktor dari Afrika Selatan untuk dipekerjakan di Iraq dan Afghanistan. Departemen Pengembangan Internasional Inggris memberikan kontrak sebesar

£270.000 kepada perusahaan *Meteoric Tactical Solutions (MTS)* milik warganegara Afrika Selatan yang berasal dari Pretoria sebagai *bodyguard* dan supir untuk pejabat senior dan pegawai pribadinya. MTS dikepalai oleh Festus van Rooyen, mantan tentara, pasukan khusus di Angkatan Bersenjata Afrika Selatan. Perusahaan tersebut juga mendapatkan kontrak untuk memberi penjagaan di Kedutaan Besar Swiss di Iraq (Senekal, Desember 2012). Bisnis privatisasi keamanan berskala militer mulai bermunculan namun kebanyakan warganegara Afrika Selatan yang berangkat bekerja sebagai kontraktor keamanan tidak mendapat pengawasan dari pemerintahnya meskipun ada undang-undang RFMA.

Tabel 2.2. Daftar Perusahaan Penyedia PMC Afrika Selatan

Nama Perusahaan	Negara
<i>Bridge Resource International</i>	Afrika Selatan
<i>Corporate Trading International</i>	Afrika Selatan
<i>Erinys International</i> < www.erinysinternational.com >	Afrika Selatan
<i>Executives Outcomes</i>	Afrika Selatan
<i>Falconer Systems</i>	Afrika Selatan

Sumber: (Andhini, 2012)

Tabel daftar penyedia PMC Afrika selatan di atas merupakan beberapa nama perusahaan yang lebih besar dari yang sudah disebutkan di paragraf sebelumnya. Erinys merupakan salah satu PMC terbesar dari Afrika Selatan di era pasca Executives Outcomes bubar. Erinys Afrika Selatan merupakan anak perusahaan dari Erinys Inggris yang dimiliki oleh pihak ketiga dan bermarkas di Kota Johannesburg. Beberapa jasa yang Erinys tawarkan adalah jasa analisis data intelijen; penilaian tingkat resiko, kelemahan, ancaman keamanan; jasa investigasi dan uji kelayakan. Target pasar untuk klien Erinys pun lebih beragam dari EO. Erinys memaparkan bahwa target pasar mereka adalah perusahaan yang bergerak di bidang ekstraksi barang mentah seperti minyak dan gas bumi serta barang tambang mineral, perusahaan pengembang infrastruktur, juga NGO dan sektor publik (Erinys, Erinys Limited Company Profile).

Erinys merupakan salah satu PMC yang disorot oleh media karena kesuksesannya mendapatkan kontrak untuk memasok dan melatih 6.500 penjaga bersenjata api untuk ditugaskan melindungi 7.000 kilometer pipa kilang minyak, pembangkit listrik, sistem persediaan air, dan 140 sumur minyak milik Kementerian Minyak Iraq. berjumlah US\$39,5 juta dari Pemerintahan Koalisi Sementara (*Coalition Provision Authority*) di Iraq pada tahun 2003. Kontrak tersebut diperluas pada 2004 untuk mengisi permintaan akan 11.400 personil keamanan serta 2100 petugas penjaga patroli untuk penjagaan 200 situs minyak (Senekal, hal. 300). Misi utama dari kontrak tersebut untuk manajemen senior Erinys:

- Membangun dasar yang baik untuk arsitektur keamanan dan kemudian secara perlahan menyerahkan kontrol pada pemerintah Iraq dalam jangka waktu dua tahun
- Hasil dari misi adalah arsitektur keamanan yang kokoh dan matang dan pasukan penjaga yang sangat terlatih yang terlatih serta mampu untuk menjaga infrastruktur minyak bernilai jutaan dollar (Erinys, 2005).

Keberadaan PMC dari Afrika Selatan meskipun banyak yang hanya ditugaskan untuk melatih penduduk lokal Irak dan tugas tersebut tergolong sebagai misi yang aman, kontraktor berkewarganegaraan Afrika Selatan tetap ada yang menjadi korban jiwa. Situs milik badan data penghitungan korban dari Operasi Pembebasan Irak dan Operasi Kemerdekaan Abadi di Afghanistan yaitu icasualties.org (2010), mencatat sebanyak dua puluh dua kontraktor keamanan berwarganegara Afrika Selatan menjadi korban dari total 468 kontraktor dari berbagai negara dari tahun 2003 sampai 2010 di Operasi Pembebasan Irak.

Tidak hanya di Irak, pada tahun 2015 lalu warganegara Afrika Selatan yang menjadi tentara bayaran juga terlacak menjadi korban di Nigeria. Pemerintah Nigeria mengontrak tentara bayaran dari negara-negara pecahan Uni Soviet dan Afrika Selatan untuk memberantas kelompok radikal Boko Haram. Seorang warganegara Afrika Selatan itu adalah Leon Lotz, 59 tahun. Lotz adalah mantan anggota unit paramiliter kepolisian Afrika Selatan di era rezim Apartheid yang

bertugas di Namibia (Smith, 2015). Pasukan militer negara-negara di regional Afrika Barat seperti Chad, Benin, Niger, dan Kamerun turut berpartisipasi menggabungkan kekuatan berjumlah 8.700 personil militer namun kehadiran para tentara bayaran Afrika Selatan yang sukses mengubah momentum peperangan dengan Boko Haram menjadi berpihak pada Nigeria (Nossiter, 2015). Nosiviwe Mapisa-Nqakula yang pada saat itu menjabat sebagai menteri pertahanan Afrika Selatan mengancam warganegaranya yang menjalankan misi sebagai tentara bayaran akan dikenai hukuman denda dan dipenjara (Groll & O'Grady, 2015).

Sebelumnya, pada 2004 Simon Mann dan 68 pasukan tentara bayaran berkewarganegaraan Afrika Selatan dan Angola tertangkap di Zimbabwe dalam perjalanan mereka menuju Guinea Khatulistiwa untuk meng kudeta Presiden Teodoro Obiang dan mengangkat oposisinya Severo Moto sebagai presiden. Peristiwa tersebut menjadi perhatian internasional karena ikut menyeret nama anak mantan Perdana Menteri Inggris, Margaret Thatcher, Mark Thatcher (Sengupta, 2008). Mann menuduh Afrika Selatan turut mendukung misinya namun dibantah oleh pemerintah Afrika Selatan yang mengambil pendirian bahwa pemerintah Afrika Selatan tidak akan pernah secara terbuka maupun diam-diam mendukung penggunaan tentara bayaran untuk kegunaan politis dimanapun termasuk di Guinea Khatulistiwa (CNN, 2008). Pemerintah Afrika Selatan sendiri saat itu memiliki undang-undang RFMA, undang-undang yang dikenal sebagai Undang-Undang Anti-Tentara Bayaran I.

2.3 Tentara Bayaran dalam Hukum Internasional

Tentara bayaran dipandang sebagai pekerjaan yang tabu oleh masyarakat internasional modern namun keberadaannya akan selalu ada seiring perkembangan jaman dan akan terus berevolusi menyesuaikan diri dengan permintaan pasar yang membutuhkan. Hal ini terbukti dengan berkembangnya tentara bayaran modern di Afrika yang diawali oleh munculnya Executives Outcomes, sebuah wadah bagi tentara bayaran profesional terorganisir dan sangat berbeda dengan tentara bayaran yang muncul pada tahun 1970an dimana para tentara bayaran masih bergerak secara individual dan terkesan brutal. Namun EO

harus takluk dan bubar oleh hukum domestik Afrika Selatan yang sangat mempengaruhi eksistensi EO pada 1990an. EO bubar pada tahun yang sama saat *Foreign Military Assistance Act* ditetapkan sebagai hukum negara. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa keberadaan hukum diperlukan untuk membatasi atau bahkan melarang keberadaan tentara bayaran atau aksi dan misi serupa.

Dalam hukum internasional, topik mengenai tentara bayaran telah dibahas sejak tahun 1970an, ketika praktek tentara bayaran di Benua Afrika sangat marak. Tentara bayaran dibahas dalam tingkat internasional seperti dalam Konvensi Internasional Melawan Rekrutmen, Penggunaan, Pembiayaan, dan Pelatihan oleh Tentara Bayaran pada 4 Desember 1989 (*International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries*) yang diselenggarakan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa. Di tingkat regional, permasalahan mengenai tentara bayaran dibahas oleh Uni Afrika (pada saat itu masih bernama Organisasi Kesatuan Afrika) pada tanggal 3 Juli 1977 di Libreville, Gabon. Tentara bayaran juga disinggung dalam Artikel 47 di Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1949. Keberadaan aturan mengenai penggunaan praktek tentara bayaran telah didiskusikan oleh komunitas internasional namun dipandang tidak efektif melihat praktek tentara bayaran masih terjadi terutama di Afrika dan negara-negara yang memiliki kondisi perpolitikan yang tidak stabil.

Di sisi lain, terdapat kode etik yang bertugas sebagai panduan jasa keamanan swasta yang dibuat atas inisiatif para pemangku kepentingan pengguna jasa keamanan swasta yang legal bernama *The International Code of Conduct for Private Security Service Provider* (ICoCA). Tujuan dari dibuatnya kode etik tersebut adalah untuk mempromosikan, mengawasi, mengatur penggunaan jasa penyedia keamanan swasta yang bertanggungjawab dan sesuai prinsip hukum nasional dan internasional mengenai hak asasi manusia. ICoCa merupakan organisasi nirlaba yang pendanaannya berasal dari anggotanya yang terdiri dari 58 penyedia jasa keamanan swasta dan tujuh negara sebagai anggota (*International Code of Conduct Association*). ICoCA membantu memberikan sertifikasi untuk anggotanya yang dianggap memenuhi standar dalam mematuhi

hukum hak asasi manusia dan prakteknya dalam pekerjaan, mengawasi para anggotanya, serta menerima pengaduan apabila terjadi pelanggaran dalam mekanisme kerja para anggotanya. ICoCA beranggotakan tujuh negara yaitu Amerika Serikat, Swiss, Australia, Kanada, Swedia, Norwegia dan Inggris. ICoCa juga beranggotakan sembilan puluh dua perusahaan keamanan dan masing-masing tiga puluh organisasi sipil dan organisasi pengawas atau pengamat.

Selain hukum-hukum dan aturan internasional, beberapa negara juga mengadopsi hukumnya sendiri untuk mengatur penggunaan PMC atau melarang praktek tentara bayaran. Beberapa negara yang memiliki hukum domestik yang melarang praktek tentara bayaran PMC adalah Afrika Selatan, Belgia, Italia, Perancis, Swiss. Di sisi lain juga terdapat negara yang memiliki regulasi yang mengizinkan dalam penggunaan PMC namun secara terbatas seperti Sierra Leone, Inggris, dan Amerika Serikat.

Dasar dari pembuatan hukum nasional mengenai pembatasan, pelarangan atau regulasi dari industri penyedia jasa pengamanan swasta dan tentara bayaran oleh negara-negara yang telah disebutkan dalam paragraf sebelumnya bermacam-macam. Negara-negara besar yang memiliki hukum tersebut seperti Amerika Serikat dan Inggris merupakan poros industri keamanan swasta besar memiliki hukum yang kompleks dalam mengatur PMC. Keduanya dikenal sebagai eksportir dalam industri jasa pengamanan swasta berdasarkan jumlah perusahaan dan warganegara yang bergerak di bidang tersebut. Negara lain seperti Perancis dan Afrika Selatan memiliki dasar sejarah berkaitan dengan aktivitas tentara bayaran sehingga diperlukan bingkai hukum, Perancis dengan unit pasukan khusus Legiun Asing² –nya yang terkenal dan Afrika Selatan dengan aktivitas Executives Outcomes dalam membantu menggulingkan pemerintahan beberapa negara di Benua Afrika.

² Legiun Asing Perancis atau yang dikenal dengan *French Foreign Legion* merupakan unit Angkatan Darat Perancis yang merekrut warga negara asing yang berminat mengabdikan pada militer Perancis. Pada 2008, negara asal prajurit yang mendaftarkan diri di Legiun berjumlah 140 sejak dibentuk pada tahun 1831. Mereka yang menjadi pasukan tidak harus menjadi warganegara Perancis namun hanya wajib bersumpah setia pada Legiun. (Pramisti, 2016)

Dari beberapa negara yang meratifikasi hukum nasional tentang tentara bayaran dan telah disebutkan tersebut, hanya Belgia dan Italia yang tercatat sebagai penandatanganan Konvensi PBB tentang Tentara Bayaran 1989. Belgia menandatangani pada 31 Mei 2002 sementara Italia meratifikasi lebih dulu pada 21 Agustus 1995. Belgia merupakan salah satu penandatanganan hasil konvensi namun dengan beberapa keberatan. Salah satunya adalah Belgia tidak menganggap hasil konvensi tersebut sebagai ketentuan yang tersirat bagi Belgia dalam menentukan perbantuan hukum dan mengubah hukum ekstradisi warganegara Belgia seperti yang telah ditentukan dalam konvensi (United Nations Treaty, 2018). Beberapa negara peratifikasi lain yang mengadopsi namun dengan mengajukan beberapa keberatan dan catatan adalah Arab Saudi, Kuba, Republik Moldova, Republik Syria, dan Venezuela. Dalam daftar negara peratifikasi konvensi tersebut juga tidak terdapat lima anggota inti negara anggota Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa.

Pada Konvensi dalam Penghapusan Tentara Bayaran di Afrika oleh Organisasi Kesatuan Afrika 1977, Afrika Selatan tercatat bukan sebagai pihak peratifikasi hasil konvensi dari total 31 negara penandatanganan (Committee of The Red Cross). Republik Afrika Selatan merupakan negara yang tidak meratifikasi konvensi internasional mengenai tentara bayaran baik itu konvensi dari PBB maupun Organisasi Kesatuan Afrika. Sikap Afrika Selatan terhadap keberadaan tentara bayaran dan perkembangan industri keamanan dianggap kurang tegas oleh publik internasional namun disikapi oleh Afrika Selatan dengan mengesahkan hukum nasional dalam melarang keberadaan tentara bayaran pada 1998.

2.3.1 Pendefinisian Tentara Bayaran dalam Hukum Internasional

Dalam Protokol Tambahan pasal 47 Konvensi Jenewa 1977, tentara bayaran didefinisikan secara individual dan spesifik. Definisi tentara bayaran ini berlaku terhadap konflik bersenjata dalam dan luar negeri. Definisi tersebut juga berlaku di situasi lain dimana terjadi situasi tindak kekerasan massal ditujukan untuk menggulingkan kekuasaan atau mengancam konstitusi, hukum,

perekonomian atau tatanan finansial atau kekayaan alam yang berharga dari sebuah negara. Protokol Tambahan pasal 47 Konvensi Jenewa mendefinisikan tentara bayaran dalam poin-poin berikut (International Committee of Red Cross, 2010).

1. Seorang tentara bayaran tidak boleh memiliki hak untuk menjadi kombatan atau tahanan perang
2. seorang tentara bayaran adalah orang yang:
 - a) direkrut secara khusus dari wilayah lokal atau luar negeri untuk berperang dalam konflik bersenjata;
 - b) melakukan, dengan sebenarnya, mengambil bagian langsung dalam pertempuran;
 - c) termotivasi untuk ambil bagian dalam pertempuran yang didasari oleh keinginan mendapat keuntungan pribadi, yang dijanjikan, dari pihak yang berkonflik, kompensasi materi secara substansi termasuk dari yang telah disepakati atau dibayarkan kepada kombatan berdasarkan dari jenjang perpangkatan yang serupa dan fungsi-fungsinya dalam angkatan bersenjata dari pihak tersebut.
 - d) bukan merupakan seseorang warganegara dari Pihak yang berkonflik atau penduduk dari wilayah yang dikuasai oleh Pihak yang bertikai;
 - e) bukan bagian dari anggota angkatan bersenjata dari Pihak yang berkonflik; dan
 - f) tidak sedang dikirim oleh Negara yang menjadi bagian Pihak yang berkonflik dalam

tugas resmi sebagai anggota angkatan bersenjata.

Protokol Tambahan Pasal 47 Konvensi Jenewa mendefinisikan tentara bayaran secara individual. Poin-poin definisi tentara bayaran dalam pasal tersebut menjelaskan tentang asal tentara bayaran seperti yang tercantum dalam poin 2(a),(d),(e). Pasal 47 dalam Protokol Tambahan ini juga mendefinisikan tentara bayaran berdasarkan motivasi dalam partisipasi mereka di pertempuran yaitu keuntungan pribadi dalam poin 2(c). Definisi tentara bayaran dalam Protokol Tambahan Pasal 47 ini dianggap usang mengingat bahwa definisi tersebut ditulis pada tahun 1949 dan perkembangan jasa “persewaan senjata” sangat pesat di era modern. Publik internasional juga sulit mendalami faktor motivasi tentara bayaran dalam definisi Pasal 7 karena motivasi individu dalam berpartisipasi di peperangan tidak dapat diukur dengan jelas.

Ketika tentara bayaran era Bob Denard atau Mad Mike Hoare mengacaukan dinamika politik negara-negara Afrika yang baru saja bebas dari kolonialisme dengan melakukan kudeta dan pemberontakan pada 1960-1970an, Organisasi regional Afrika akhirnya turut turun tangan. Organisasi Kesatuan Afrika (*Organization Africa Union*) mengadakan konvensi khusus untuk membahas permasalahan regional Afrika yaitu keberadaan tentara bayaran. Hasil konvensi tersebut disetujui oleh 31 negara Afrika dan mulai diberlakukan pada tanggal 22 April 1985. Menurut Konvensi Organisasi Kesatuan Afrika, deskripsi dari tentara bayaran dan kejahatan yang mereka lakukan adalah (*Organization of African Unity, 1977*):

(a) an individual, group or association, representative of a State and the State itself; with the aim of: (b) opposing by armed violence a process of self-determination stability or the territorial integrity of another State; and the types of acts: (c) shelters, organizes, finances, assists, equips, trains, promotes, supports or in any manner employs bands of mercenaries; enlists, enrolls or tries to enroll in the said bands; allows such activities to be carried out in any territory under its jurisdiction or in any place under its control or affords facilities for transit, transport or other operations of the above mentioned forces.

[terjemahan: (a) seseorang, kelompok atau asosiasi, wakil dari pemerintahan dan pihak pemerintah itu sendiri; yang memiliki tujuan untuk: (b) melawan dengan menggunakan kekerasan bersenjata yang melakukan perlawanan terhadap sebuah proses dari upaya kestabilan menentukan nasib bangsa atau integritas wilayah dari negara lain; dan bermacam bentuk yang serupa; (c) melindungi, mengorganisir, mendanai, membantu, memperlengkapi, melatih, mempromosikan, mendukung atau dalam berbagai sikap mempekerjakan sekelompok tentara bayaran; mendapatkan, mendaftar atau mencoba untuk mendaftar dalam kelompok tersebut; mengizinkan aktivitas tersebut dilangsungkan di berbagai wilayah di bawah yurisdiksi atau di berbagai tempat di bawah kendali pemerintahan atau memberikan fasilitas untuk singgah, transportasi atau operasi lain dari pasukan yang sudah disebutkan di atas.]

Konvensi OAU dalam Penghapusan Praktek Tentara Bayaran tahun 1977 mendefinisikan tentara bayaran lebih baik dari Pasal 47 dalam Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1949. Pendeskripsian tentara bayaran dalam Konvensi OAU melengkapi definisi tentara bayaran dengan kata “kelompok” atau “asosiasi” sehingga pemaknaan tentara bayaran tidak berkuat secara personal seperti yang tertulis dalam Protokol Tambahan Pasal 47. Selain itu, Konvensi OAU juga melengkapi deskripsi tugas dari mereka yang bisa dikategorikan sebagai tentara bayaran meskipun kurang spesifik seperti yang tertuang dalam poin (c). Ketiadaan deskripsi mengenai pihak pemberi kontrak yang dianggap legal menurut Konvensi OUA membuat definisi milik Konvensi OUA memiliki celah. OUA hanya menjelaskan tentang jenis pekerjaan tentara bayaran secara umum yang dapat mengacaukan keamanan di Benua Afrika tanpa memberikan deskripsi spesifik seperti bagaimana di masa depan apabila terdapat badan legal seperti PBB atau organisasi kemanusiaan menyewa jasa “perlindungan keamanan”.

Definisi milik Konvensi OUA tetap memiliki kekurangan seiring praktek tentara bayaran di kemudian hari lahir kembali dengan bentuk baru dan ironisnya tentara bayaran berbentuk korporasi tersebut justru lahir di tengah kekacauan politik Benua Afrika pada dekade 1990-an. Executives Outcomes, kelompok tentara bayaran dari Afrika Selatan terpopuler pada dekade tersebut memberikan

dampak baru terhadap cara publik internasional memandang tentara bayaran. Executives Outcomes melabeli diri mereka sebagai penyedia jasa keamanan yang legal dan hanya mau menandatangani kontrak kepada pihak pemerintah yang resmi dan diakui (New York Times, 1997). PMC lain yang bekerja untuk badan resmi seperti badan kemanusiaan atau PBB serta perkembangan tugas PMC yang berpartisipasi dalam peperangan secara langsung (*direct*) maupun tidak langsung (*indirect*) juga menambah ragam spesifikasi tugas dan misi. Eksistensi EO dan PMC lain dalam perkembangan era modern membuat definisi tentara bayaran menjadi lebih beragam.

2.3.2 Kegagalan Hukum Internasional dalam Mengatur Industri Keamanan dan Private Military Company

Hasil Konvensi Internasional Melawan Rekrutmen, Penggunaan, Pembiayaan, dan Pelatihan oleh Tentara Bayaran yang diselenggarakan oleh Sidang Umum Persatuan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989 merupakan sebuah peningkatan dari hukum atau perjanjian-perjanjian sebelumnya yang membahas tentang tentara bayaran. Konvensi PBB mengenai tentara bayaran tersebut berangkat dari definisi kumulatif tentara bayaran milik Protokol Tambahan Pasal 47 Konvensi Jenewa 1977 serta Konvensi Organisasi Kesatuan Afrika tentang Tentara Bayaran pada 1977. Konvensi Melawan Tentara Bayaran yang diselenggarakan oleh PBB menambahkan hukuman ekstradisi bagi para pelanggar dari negara tempat tentara bayaran tersebut melakukan kejahatan seperti yang tertuang dalam pasal 15. Meskipun dianggap sebagai sebuah peningkatan dari hukum-hukum internasional sebelumnya, Konvensi yang diselenggarakan oleh Sidang Umum PBB mengenai tentara bayaran ini memiliki beberapa kelemahan. Hukum internasional yang disetujui oleh 35 negara tersebut tidak langsung berlaku. Konvensi Internasional Melawan Rekrutmen, Penggunaan, Pembiayaan, dan Pelatihan oleh Tentara Bayaran mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2001, 12 tahun setelah konvensi tersebut diadakan dalam Sidang Umum PBB. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, dekade 1990-an merupakan kebangkitan praktek tentara bayaran berbentuk perusahaan penyedia jasa keamanan dari Afrika

Selatan dengan Executives Outcomes-nya yang sangat populer. Di luar Benua Afrika, Amerika Serikat mengalihdayakan kemampuan militernya secara masif pada pihak swasta sipil pada dekade 1990-an, saat terjadi Perang Teluk atau ketika terjadi pengurangan kekuatan angkatan bersenjata pasc Perang Dingin berakhir.

Sebagai contoh aktifnya praktek kontraktor keamanan yang digunakan oleh negara pada 1990-an, Amerika Serikat banyak melakukan intervensi militer dalam kebijakan luar negerinya seperti pada Perang Teluk tahun 1991 yang menerjunkan kontraktor keamanan swasta cukup besar untuk membantu angkatan bersenjata dengan rasio 1 kontraktor dari PMC berbanding 50 personel aktif yang bertugas. Angka tersebut terus naik pada intervensi konflik etnis di Bosnia-Herzegovina pada pertengahan 1990-an dan Kosovo pada 1999 yang mencapai perbandingan 1 kontraktor per 10 tentara dari angkatan bersenjata AS yang aktif. angka tersebut setara dengan penggunaan PMC di Perang Irak pada 2004 (Avant, Think Again: Mercenaries, 2009). Para kontraktor keamanan tersebut mengerjakan tugas-tugas penting hingga tugas yang dianggap sepele oleh militer seperti pelatihan untuk polisi lokal, mengoperasikan sistem pertahanan udara yang kompleks, penterjemah sampai interogasi tahanan perang. Terjadi ketiadaan peran dari lembaga internasional dalam mengatur industri keamanan pada dekade 1990-an akibat dari belum berlakunya Konvensi Internasional Melawan Rekrutmen, Penggunaan, Pembiayaan, dan Pelatihan oleh Tentara Bayaran yang membuat keberadaan tentara bayaran atau kontraktor keamanan berada di antara kebutuhan dan penolakan.

Amerika Serikat juga merupakan contoh lain mengenai bagaimana negara-negara yang memiliki angkatan bersenjata besar, namun tidak turut berpihak pada Konvensi tentang Tentara Bayaran PBB tahun 1989. Amerika Serikat merupakan salah satu dari lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang tidak meratifikasi konvensi 1989. Kebanyakan dari 35 negara yang meratifikasi konvensi merupakan negara dunia ketiga dan negara pecahan Uni Soviet. Di sisi lain, Afrika Selatan juga bukan merupakan negara yang meratifikasi konvensi tersebut, hal tersebut merupakan sebuah kontradiksi apabila melihat fakta bahwa

PMC dari Afrika Selatan bertanggungjawab atas ketidakstabilan politik dan keamanan regional Afrika pada era sebelum berlakunya Konvensi tentang Tentara Bayaran 1989. Afrika Selatan juga tidak menandatangani hasil Konvensi yang membahas mengenai tentara bayaran tahun 1977 yang diselenggarakan oleh Organisasi Kesatuan Afrika walau dapat dimaklumi karena Afrika Selatan tahun 1977 memiliki pemerintahan yang berbasis Apartheid. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara besar masih menunjukkan ketertarikannya dan kebutuhan yang tinggi dalam menggunakan jasa penyedia keamanan swasta baik itu dalam kondisi perang maupun damai.

Konvensi Internasional Melawan Rekrutmen, Penggunaan, Pembiayaan, dan Pelatihan oleh Tentara Bayaran tahun 1989 yang diratifikasi oleh hanya 35 negara dunia ketiga anggota Sidang Umum PBB dipandang kurang kuat dalam mengatur atau melarang penggunaan praktek tentara bayaran. Keengganan negara-negara yang memiliki sejarah menggunakan jasa penyedia keamanan swasta seperti Inggris, Perancis, Amerika Serikat dan Afrika Selatan dalam meratifikasi konvensi PBB tahun 1989 tidak berarti disikapi acuh oleh negara-negara tersebut. Negara-negara yang tidak meratifikasi tersebut mengerti tentang bagaimana mengatur atau meregulasi PMC dan menjadikannya industri yang menguntungkan untuk negara seperti yang dicontohkan Amerika Serikat. Pemahaman akan industri keamanan membuat negara-negara tersebut memiliki undang-undang nasional yang mengatur tentang alihdaya fungsi militer untuk keuntungan negara daripada tunduk pada aturan hukum internasional yang bisa jadi merugikan.

Sikap tidak setuju dalam mengikuti aturan internasional sebagai pedoman yang ditunjukkan beberapa negara lain adalah refleksi kegagalan hukum-hukum internasional dalam mendefinisikan Private Military Company yang memiliki pandangan berbeda bagi negara-negara pengguna penyedia jasa industri keamanan swasta seperti PMC. PMC di era modern ini merupakan komponen esensial bagi angkatan bersenjata sebelum terjun dalam peperangan. PMC yang diperbantukan dalam Perang Irak dan Afghanistan berbeda dengan PMC di era Executives Outcomes meskipun sama-sama beroperasi secara rahasia dan akuntabilitasnya

dipertanyakan. Tidak adanya riset akademisi mengenai definisi PMC yang disetujui oleh pemerintahan negara-negara dunia secara kolektif membuat sulitnya tercipta hukum yang disetujui bersama. Terlebih, industri bisnis keamanan dan fungsinya dalam berbagai bidang berkembang seiring waktu yang membuat definisi lama mengenai tentara bayaran yang lebih populer daripada PMC akan cepat usang.



BAB 3.

KEGAGALAN UU ANTI-TENTARA BAYARAN I TAHUN 1998

3.1 Kegagalan RFMA 1998 sebagai Regulator Industri Keamanan Swasta di Afrika Selatan

Keberadaan jasa penyedia keamanan swasta seringkali diasosiasikan dengan gejala-gejala negara yang lemah terutama terhadap negara-negara di kawasan Benua Afrika. Ketidakmampuan negara untuk menyediakan keamanan bagi warganegara dan wilayah merupakan sebagian dari cerita mengenai penyediaan jasa keamanan swasta dalam konteks negara yang lemah. Korupsi di lingkup kepolisian dan militer serta kroni politik turut memperburuk hal tersebut. Eksploitasi struktur ekonomi dan dominasi elit politik turut memperburuk kondisi negara dan memungkinkan PMC masuk dalam struktur ekonomi dan pertahanan. PMC seringkali masuk dalam interseksi dari proses kekacauan tersebut melalui cara menumpang perusahaan multinasional yang memiliki industri ekstraksi barang mentah. Pertumbuhan sektor penyedia jasa keamanan swasta menyumbangkan ketidakadilan dalam distribusi pemerataan keamanan negara-negara lemah. Pola ini tidak hanya terjadi di Afrika tapi juga berulang-ulang di negara seperti Kolombia, Chechnya (Rusia), dan Tajikistan yang memiliki lingkungan dan wilayah berbahaya namun memiliki potensi ekonomi (Holmqvist, hal. 12).

Pemerintah negara Afrika Selatan menyadari pada akhir dekade 1990-an bahwa keberadaan PMC di Afrika Selatan dapat mempengaruhi iklim politik regional dan memberikan preseden buruk terhadap Afrika Selatan yang dikenal sebagai negara asal Executives Outcomes. Guna menangani perkembangan bisnis PMC, Pemerintah Afrika Selatan menyusun undang-undang khusus yang kemudian ditetapkan dengan nama Undang-Undang Peraturan tentang Perbantuan Bantuan Militer Asing. EO sebagai salah satu jenis tentara bayaran modern telah berkembang pada saat itu dan kemudian muncul PMC-PMC lain seperti Sandline International yang bekerja untuk perusahaan multinasional di beberapa negara

Afrika. Perkembangan bisnis tentara bayaran menjadi masalah baru bagi Afrika Selatan yang belum lama bebas dari Apartheid.

Undang-Undang Peraturan tentang Perbantuan Bantuan Militer Asing (*Regulation of Foreign Military Assistance/ RFMA*) yang diberlakukan tahun 1998 merupakan undang-undang yang cukup spesifik mengenai hukum tentara bayaran pada dekade 1990-an. RFMA merupakan respon keras pemerintah Afrika Selatan atas aksi Executives Outcomes di Sierra Leone pada 1995. Undang-undang ini dianggap sebagai hukum domestik terkuat di antara negara lainnya dalam hal meregulasi aktivitas PMC (Holmqvist, 2005).

Apabila dalam berbagai hukum-hukum internasional sebelumnya definisi tentang tentara bayaran hanya membahas tentang siapa dan bagaimana seseorang dapat dikategorikan sebagai tentara bayaran, maka RFMA menambahkan dengan tugas dan pekerjaan tentara bayaran secara spesifik bahkan dianggap terlalu luas namun kurang detail. Dalam RFMA 1998, Tentara bayaran didefinisikan dalam pasal satu (1) ayat tiga (iii) sebagai (Rep. South Africa, 1998):

Pasal

1. (iii) Seseorang yang melakukan “perbantuan militer asing” yang artinya jasa atau tugas yang berhubungan dengan militer, atau setiap upaya, dorongan, hasutan, atau ajakan untuk memberikan jasa yang berbentuk:
 - e) Bantuan militer pada suatu pihak dalam konflik bersenjata melalui
 2. Bimbingan atau pelatihan;
 3. Personil, pembiayaan, logistik, intelijen, atau dukungan operasional;
 4. Perekrutan personil;
 5. Layanan medis atau paramedis;
 6. Pengadaan peralatan;
 - f) Jasa keamanan untuk perlindungan individu yang terlibat dalam konflik bersenjata atau dalam properti mereka;

- g) Tindakan apa pun yang ditujukan untuk menggulingkan pemerintahan atau merusak tatanan konstitusional, kedaulatan atau integritas teritorial suatu negara;
- h) tindakan lain yang merupakan hasil dari memajukan kepentingan militer dari suatu pihak lain dalam konflik bersenjata, tetapi bukan kegiatan bantuan kemanusiaan atau sipil yang bertujuan untuk meringankan penderitaan warga sipil di daerah konflik bersenjata.

Dalam pasal satu ayat enam (vi), seorang “individu” yang dapat dikenai hukum oleh undang-undang ini diartikan secara khusus sebagai (Rep. South Africa, 1998) “seseorang yang merupakan warganegara atau penduduk yang bermukim secara tetap dalam Republik, seseorang yang secara yuridis terdaftar atau termasuk dalam Republik Afrika Selatan, dan setiap warganegara asing yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dalam wilayah Republik (Afrika Selatan)”. Undang-undang RFMA mewajibkan permohonan ijin bertugas untuk warga sipil penduduk atau warganegara Afrika Selatan supaya dapat bertugas atau memberikan bantuan kemanusiaan di luar negeri. Permohonan ijin tersebut dialamatkan kepada “Komite” seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat ii (Rep. South Africa, 1998):

- (ii) “Komite” yang dimaksud adalah Komite Nasional Kontrol Senjata Api Konvensional (*National Conventional Arms Control Committee*) sebagaimana yang telah diatur oleh Eksekutif Negara yang ditetapkan pada 18 Agustus 1995.

RFMA memberikan kriteria kepada pemohon otorisasi perbantuan militer asing supaya dapat disetujui oleh Komite. Dalam pasal 7, dijelaskan mengenai kriteria persetujuan atau penolakan kepada pemohon ijin otorisasi. Kriteria tersebut yaitu:

Pasal 7

(1) Sebuah otorisasi atau persetujuan sesuai pasal 4 dan 5 tidak dapat disetujui apabila--

- (a) bertentangan dengan kewajiban Republik dalam istilah hukum internasional;
- (b) mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan mendasar di wilayah di mana bantuan militer asing akan diberikan;
- (c) membahayakan perdamaian dengan mengancam mengacaukan kemampuan militer dimana wilayah tersebut membutuhkan bantuan, atau kemungkinan terjadinya, atau sebaliknya berkontribusi pada ketidakstabilan regional dan berpengaruh secara negatif pada *balance of power* pada wilayah;
- (d) mendukung atau mendorong terorisme dalam berbagai bentuk;
- (e) berkontribusi pada eskalasi konflik regional
- (f) merugikan kepentingan nasional atau internasional Republik Afrika Selatan;
- (g) tidak dapat diterima dengan berbagai alasan apapun

(2) Seseorang yang mengajukan permohonan otorisasi atau persetujuan yang belum disetujui oleh Menteri Pertahanan dapat meminta alasan tertulis dari Menteri.

(3) Menteri Pertahanan dapat mencantumkan alasan penolakan atau persetujuan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Adanya sistem perijinan oleh kontraktor keamanan sebagai pemohon ijin untuk bekerja di negara lain kepada pemerintah Afrika Selatan, membuat RFMA 1998 menjadi salah satu undang-undang yang membahas tentang PMC di dunia selain Amerika Serikat yang juga memiliki hukum dalam mengatur secara langsung keterlibatan pihak swasta dalam aktivitas penerjunan dan penggunaan kemampuan militer. Menurut Holmqvist (2005, hal. 52), adanya Undang-Undang tersebut memiliki dua tujuan: guna melarang penggunaan tentara bayaran “secara langsung” yang didefinisikan sebagai kombatan dalam konflik bersenjata yang

bertujuan mencari keuntungan pribadi dan yang kedua, mengatur penugasan militer di luar negeri yang apabila Pemerintah Afrika Selatan pada saat diimplementasinya undang-undang menemui permasalahan mengenai penugasan tentara di luar negeri akan berpotensi memberikan pelarangan ekspor terhadap jasa penyedia keamanan ke zona perang di masa depan. Faktanya, enam tahun pasca RFMA, warganegara Afrika Selatan melamar pekerjaan sebagai kontraktor keamanan di Perang Irak dan Afganistan. Sebuah aktivitas yang telah dilarang oleh hukum RFMA dan membuktikan bahwa RFMA belum siap dalam menghadapi jenis tentara bayaran yang lebih modern dan profesional yang berbeda dari Executives Outcomes.

RFMA berguna sebagai penyaring seleksi awal bagi kontraktor keamanan bekerja secara legal untuk PMSC luar negeri tetapi RFMA memiliki definisi pengkategorian yang berbeda dengan hukum-hukum luar negeri dan cenderung terlalu komplis seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya sehingga menyebabkan kontraktor keamanan dipandang ilegal oleh hukum domestik. RFMA mencantumkan beberapa kategori kontraktor keamanan yang sebenarnya dianggap legal oleh hukum internasional seperti pada pasal 1 poin (a) dalam RFMA mengenai pengadaan peralatan dan pelayanan atau bantuan medis. Pelarangan tersebut membuat misi bantuan kemanusiaan internasional jatuh sebagai kegiatan ilegal oleh RFMA sebagai hukum domestik. Tipologi jenis-jenis PMC yang dibuat oleh P. W. Singer turut mendukung bagaimana RFMA melakukan kesalahan dengan mengkategorikan bantuan medis termasuk sebagai kegiatan yang bisa dilakukan tentara bayaran karena bantuan medis dapat dikategorikan sebagai salah satu jasa yang disediakan oleh PMC yang legal.

Meskipun dianggap sebagai undang-undang terkuat dalam lingkup pembahasan tentang tentara bayaran, terdapat beberapa celah dari undang-undang RFMA yang dimanfaatkan oleh para tentara bayaran Afrika Selatan. RFMA tidak menjelaskan mengenai regulasi tentang bantuan kemanusiaan di wilayah konflik. Mengenai bantuan kemanusiaan disinggung dalam poin D pasal 1 dalam RFMA namun tidak dijelaskan dengan detail jenis-jenis bantuan kemanusiaan yang diijinkan Komite Nasional Kontrol Senjata Api Konvensional (NCACC). Celah

kurang detailnya penjelasan mengenai aktivitas kegiatan bantuan kemanusiaan untuk membebaskan penderitaan warga sipil di area konflik bersenjata dimanfaatkan oleh PMC dengan mengklaim bahwa apa yang mereka lakukan di Irak adalah legal karena memberikan bantuan kemanusiaan, bukan berpartisipasi langsung dalam perang. Hal ini mengakibatkan banyak warga Afrika Selatan terutama ex-militer pergi ke Irak untuk bekerja sebagai kontraktor keamanan.

Kelemahan lain dari RFMA adalah terlalu luasnya definisi aktivitas yang dikategorikan dalam pemberian jasa yang ditawarkan oleh tentara bayaran. Aktivitas-aktivitas tersebut pada akhirnya tidak bisa dikategorikan sebagai aktivitas militer ilegal. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 a poin iii, iv, dan v mengenai perekrutan, pemberian jasa pelayanan medis, dan pengadaan peralatan. Ketiga jenis jasa tersebut termasuk dalam tipologi PMC jenis ketiga yang dijelaskan oleh P.W. Singer tentang pengadaan jasa medis, transportasi, logistik, dan teknis penunjang lainnya. Namun dalam prakteknya, tipologi jenis teknis ini cukup sulit diterapkan karena berbenturan dengan aktivitas bantuan kemanusiaan (*humanitarian aid*) yang kemudian digunakan sebagai alasan untuk pergi ke Irak. Jasa pengadaan peralatan yang tidak dijelaskan secara detail dan pelayanan medis bisa saja jatuh dalam aktivitas Palang Merah Internasional atau bahkan bantuan kemanusiaan PBB yang membuat warganegara Afrika Selatan sulit untuk mendaftar sebagai sukarelawan NGO atau lembaga lain yang membantu dalam meringankan beban kemanusiaan di daerah konflik.

Di sisi lain, terdapat kendala lain dalam menerapkan RFMA. Menurut Deborah Avant (2009, hal. 162), terdapat tingkat ketidakpercayaan di dalam komunitas PMC karena tidak terdapat keadilan dalam praktek penerapan hukum RFMA yang membuat RFMA tidak efektif dan menciptakan halangan untuk mengajukan permohonan lisensi untuk pemberian “bantuan kemanusiaan” ke luar. Seperti yang diketahui sebelumnya, RFMA memiliki mekanisme lisensi untuk permohonan bekerja di luar negeri di sektor keamanan yang dikontrol NCACC. Kebijakan NCACC sendiri adalah bagian dari Promosi Hukum Keadilan Administratif (*Promotion of Administrative Justice Act*) dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional dan hukum hak asasi manusia. Pengaplikasian hukum

RFMA akan mulai berlaku pada daerah-daerah konflik dan pada penerima jasa bantuan PMC yang merupakan salah satu pihak yang berkonflik.

Tren penggunaan kontraktor keamanan swasta di sektor sipil meningkat di berbagai belahan dunia. Beberapa negara memiliki ketimpangan antara kekuatan kepolisian negara dengan kontraktor pegawai keamanan swasta. Dari 81 negara dimana kontraktor keamanan bekerja, 44 negara memiliki jumlah kontraktor keamanan yang lebih besar daripada jumlah polisi di negara-negara tersebut. Bisnis dalam industri keamanan merupakan bisnis yang saat ini berkembang dengan cepat, mencapai 6% per tahun (Provost, 2017). Di Afrika Selatan, industri keamanan dalam negeri mengalami peningkatan dalam 20 tahun terakhir. Pada 1997, terdapat 110.117 petugas kepolisian yang aktif bertugas dan 115.331 kontraktor keamanan swasta. Namun pada 2014 terjadi ketimpangan jumlah antara petugas kepolisian yang berjumlah sebanyak 153.116 aparat polisi Afrika Selatan berbanding dengan 487.058 petugas keamanan swasta (Areff, 2015).

Industri keamanan swasta global saat ini bernilai sekitar US\$ 180 milyar dan diprediksi akan terus berkembang dan naik menjadi US\$240 milyar pada tahun 2020, melebihi nilai Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product*) dari 100 negara seperti Hungaria, Portugal, dan Rumania (McCarthy, 2017). Jumlah nilai bisnis industri keamanan yang terus meningkat menjadikan sektor bisnis tersebut menjadi primadona untuk negara seperti Afrika Selatan yang memiliki tingkat pengangguran yang tinggi dan tingkat kriminalitas tinggi. Pada tahun 2004, tingkat angka pembunuhan yang direncanakan mencapai angka 54,25 per seratus ribu jumlah populasi di Afrika Selatan. Tertinggi diantara negara-negara lain di Benua Afrika (Petrini, 2010). Jumlah tenaga kepolisian tidak dapat mengkaver tingkat kriminalitas yang tinggi di Afrika Selatan dan memunculkan kesempatan bagi tenaga keamanan swasta untuk mengisi kekosongan tugas tersebut. Tingginya tingkat pengangguran dalam negeri dan perkembangan industri keamanan yang pesat juga mendorong kontraktor keamanan Afrika Selatan yang lebih terlatih untuk bekerja di luar negeri seperti medan perang Irak dan Afganistan.

3.2 PMAA 2007 sebagai UU Anti- Tentara Bayaran II

The Prohibition of Mercenary Activities and Regulation of Certain Activities in Country of Armed Conflict Act (PMAA) merupakan Undang- Undang Anti- Tentara Bayaran II yang ditetapkan oleh pemerintah Afrika Selatan pada 16 November 2007 untuk diproyeksikan sebagai pengganti UU Anti Tentara Bayaran I RFMA 1998. UU PMAA bertujuan untuk melarang aktivitas tentara bayaran; untuk mengatur penyediaan bantuan atau layanan militer atau yang berhubungan dengan militer di negara yang memiliki konflik bersenjata; untuk mengatur pendaftaran warga negara Afrika Selatan atau penduduk tetap di angkatan bersenjata lainnya; untuk mengatur penyediaan bantuan kemanusiaan di negara yang mengalami konflik bersenjata; untuk memberikan yurisdiksi ekstra-teritorial untuk pengadilan Republik sehubungan dengan pelanggaran tertentu; untuk menyediakan pelanggaran dan hukuman; dan untuk menyediakan hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut (Government Gazette: Republic of South Africa, 2007). UU Anti- Tentara Bayaran II ini dirancang sebagai respon dari fenomena kembalinya tentara bayaran berkewarganegaraan Afrika Selatan yang beraktivitas dalam lingkup global.

Terdapat tambahan yang sangat detail pada UU Anti- Tentara Bayaran II 2007 dibandingkan UU pendahulunya. Pada UU yang terbaru, dijelaskan dengan rinci dalam pasal 1 ayat 1 mengenai jenis “jasa keamanan” terlarang yang ditawarkan. Menurut PMAA 2007, “jasa keamanan” yang dimaksud adalah aktivitas seperti:

- (a) perlindungan atau penjagaan keamanan terhadap individu, personal, atau properti dalam bentuk apapun;
- (b) penasihat dalam pemberian perlindungan atau penjagaan keamanan individu atau properti;
- (c) penasihat dalam penggunaan peralatan keamanan;
- (d) penyedia jasa respon reaktif dalam hubungannya dengan penjagaan keamanan seseorang atau properti dalam berbagai bentuk;

- (e) penyedia jasa pelatihan keamanan atau penyedia instruksi keamanan atau penyedia jasa keamanan prospektif;
- (f) memasang, servis, atau memperbaiki peralatan keamanan;
- (g) memonitor sinyal atau transmisi dari peralatan keamanan;
- (h) menyediakan personil atau jasa, secara langsung atau tidak langsung, untuk melakukan berbagai jenis jasa seperti yang telah disebutkan dalam ayat (a) sampai (g); atau
- (i) mengelola, mengendalikan, atau mengawasi pemberian layanan apa pun yang disebut dalam ayat (a) sampai (h)

Pengecualian atas tindakan yang termasuk sebagai layanan atau jasa yang dikategorikan terlarang muncul dalam pasal 1 ayat 2 PMAA 2007. PMAA menginginkan agar UU Anti- Tentara Bayaran yang baru sesuai dan terintegrasi dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 1 ayat 2 yaitu.

1. (2) Terlepas dari undang-undang ini atau undang-undang lainnya, tidak ada tindakan di atas yang dapat ditafsirkan sebagai bantuan atau layanan jika tindakan tersebut dilakukan,
 - (a) sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya hukum humaniter internasional, termasuk tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Hubungan persahabatan dan Kerjasama antar Negara; atau
 - (b) dilakukan oleh dinas keamanan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 199 Konstitusi Republik Afrika Selatan, 1996, baik dalam memenuhi kewajiban internasional atau dalam hal hukum lainnya.

Perbedaan lainnya antara UU Anti-Tentara Bayaran I dengan PMAA 2007 –Tentara sebagai UU Anti Tentara Bayaran II adalah adanya regulasi khusus yang mengatur bantuan kemanusiaan ke wilayah konflik. Pemerintah Afrika Selatan mengatur alur keluar bantuan kemanusiaan ke wilayah konflik karena banyaknya tentara bayaran berkewarganegaraan Afrika Selatan di Irak dan Afghanistan

sebagai kontraktor untuk PMC luar negeri dengan penyalahgunaan ijin permohonan untuk bantuan kemanusiaan. Regulasi bantuan kemanusiaan di wilayah konflik tertuang dalam pasal 5, PMAA 2007 yaitu.

5. (1) Organisasi kemanusiaan dari Afrika Selatan tidak memungkinkan untuk menyediakan bantuan kemanusiaan di negara konflik atau wilayah yang telah ditetapkan sesuai regulasi, kecuali organisasi tersebut telah terdaftar dalam komite sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

(2) sebuah organisasi yang dimaksud sesuai ayat (1) harus mengajukan aplikasi permohonan untuk pendaftaran kepada komite dalam bentuk dan cara yang ditentukan.

Melalui pasal 5 PMAA, Pemerintah Republik Afrika Selatan berusaha agar tidak ada PMC dari Afrika Selatan yang memanfaatkan hukum internasional dalam hal bantuan kemanusiaan di daerah konflik bersenjata sebagai alasan untuk mengambil keuntungan pribadi kecuali ada ijin khusus dari Komite Konvensi Nasional Kontrol Senjata milik pemerintah Afrika Selatan.

BAB 5. KESIMPULAN

Tentara bayaran dalam sejarah dunia berkembang seiring waktu. Dalam perkembangannya, tentara bayaran mulai diakui sebagai *private military company*. Konsep PMC sendiri mulai diperkenalkan oleh kelompok tentara bayaran dari Afrika Selatan yang dipionirkan oleh *Executives Outcomes*. Eksistensi EO dipandang sebagai preseden buruk bagi imej Afrika Selatan yang baru merdeka dari rezim Apartheid. Undang-undang *Regulation of Foreign Military Assistance* tahun 1998 disahkan supaya aktivitas tentara bayaran dari Afrika Selatan menjadi terbatas namun praktek PMC mengglobal dan RFMA dipandang sebagai kegagalan membendung keberangkatan warganegaranya yang berangkat ke Irak sebagai kontraktor keamanan. Sebagai salah satu pengeksport tenaga kontraktor keamanan terbesar ketiga dunia dan sejarah yang kuat dalam hubungannya dengan tentara bayaran, Pemerintah Afrika Selatan berusaha untuk mengkontaminasi aktivitas kontraktor keamanan dengan undang-undang baru untuk menutup kekurangan RFMA yaitu *The Prohibition of Mercenary Activities and Regulation of Certain Activities in Country of Armed Conflict* tahun 2007 atau yang dikenal dengan Undang- Undang Anti-Tentara Bayaran.

Terdapat beberapa faktor yang membuat Pemerintah Afrika Selatan menyetujui Undang- Undang Anti Tentara Bayaran pada 2007. Pertama, Afrika Selatan berusaha untuk mencari formula definisi yang tepat untuk mengisi definisi dan istilah mengenai tentara bayaran dan kontraktor keamanan yang tepat. Hukum dan perjanjian internasional mengenai tentara bayaran dipandang usang dan kurang mengakomodasi dengan kondisi Afrika Selatan. RFMA yang disahkan sebagai undang- undang Anti- Tentara Bayaran pada 1998 memiliki beberapa celah seperti tidak adanya detail sistem pihak pemberi kontrak yang legal untuk misi bantuan kemanusiaan yang mengakibatkan berbenturan dengan bingkai kerja milik *The International Code of Conduct for Private Security Service Provider* (ICoCA) yang justru melegalkan PMC dengan beberapa persyaratan seleksi. Hal ini dimanfaatkan oleh warga negara Afrika Selatan untuk melamar sebagai kontraktor keamanan di luar negeri.

Kedua, disahkannya Undang-Undang Anti-Tentara bayaran yang baru pada tahun 2007 adalah untuk melarang total aktivitas tentara bayaran dan meregulasi secara ketat aktivitas yang serupa di wilayah konflik seperti di Sierra Leone, Guinea Khatulistiwa, Irak, dan Afghanistan. Afrika Selatan tidak ingin warganegaranya untuk turut berpartisipasi di wilayah konflik global terutama dimana pemerintah Afrika Selatan tidak memiliki kerjasama dan kebijakan luar negeri yang spesifik. Hal ini sejalan dengan visi Afrika Selatan untuk menjalin persahabatan dengan wilayah regional pasca rezim Apartheid.

. Mengingat bagaimana tentara bayaran dapat mengubah jalannya alur pemerintahan dan kebijakan suatu negara, Afrika Selatan berupaya untuk menghapus aktivitas dan pasar tentara bayaran di benua Afrika secara khusus dan global dengan metodenya sendiri melalui UU Anti- Tentara Bayaran 2007. Tersedianya jasa kontraktor keamanan meskipun legal tetap dianggap tabu oleh Afrika Selatan karena ketiadaan konsistensi status kontraktor keamanan dalam hukum internasional. Menekan kuantitas kontraktor dan tentara bayaran dalam pasar penyedia jasa keamanan swasta juga berarti menahan warganegara Afrika Selatan untuk tetap bekerja di Afrika Selatan memperkuat sistem pertahanan nasional yang berkurang ketika banyak tenaga ahli seperti polisi dan tentara nasional Afrika Selatan berangkat ke Irak dan Afghanistan sebagai kontraktor keamanan.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Abraham, G. 1999. The Contemporary Legal Environment. dalam G.M. Stremlau dan John, *The Privatisation of Security in Africa*. South Africa: South Africa Institute of International Affairs.
- Andhini. 2012. *Kapitalisme dan Blackwater*. Jakarta: Mahaka Publishing.
- Abrahamsen, R. dan M. W Williams. 2011. *Security beyond the state: Private security in international politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ashari, K. 2015. *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Buchner, S. (2007). Private Military Companies and Domesitic Law in South Africa. dalam T. Jager, & G. Kummel, *Private Military and Security Companies: Chances, Problems, Pitfalls and Prospects*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Caffero, W. 2006. *John Hawkwood: An English Mercenary in Fourteenth-Century Italy*. Baltimore: John Hopkins University Press.
- Cotton, S., Petersohn, U., Dunigan M., Zander Cotugno, M., dan Burkhart, Q. 2010. *Hired Guns : Views About Armed Contractors in Operation Iraqi Freedom*. RAND Corporation.
- Kaldor, M. 2002. *New & Old Wars*. Cambridge: Polity Press.
- Kinsey, C. 2006. *Corporate Soldiers and International Security: The Rise of Private Military Companies*. New York: Routledge.
- Lanning, M. L. 2005. *Mercenary :Soldiers of Fortune, from Ancient Greece to Today's Private Military Companies*. New York: Presidio Press.
- Mas'oed, M. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*. Jakarta : Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Musah, A. F. dan J. K. Fayemi. 2000. Introduction: Brief Overview of the African Encounter with Mercenarism. dalam Musah A.F., dan J. K. Fayemi, *Mercenaries: An African Securities Dilemma*. London: Pluto Press.

- Ortiz, C. 2010. *Private Armed Forces and Global Security: Guide to the Issues*. California: Praeger.
- Percy, S. 2007. *Mercenaries: The History of a Norm in International Relations*. Oxford dan New York: Oxford University Press.
- Singer, P. W. 2003. *Corporate Warriors : the rise of the privatized military industry* . Ithaca & London: Cornell University Press.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* . Bandung: Alfabeta.
- Spicer, T. 1999. *An Unorthodox Soldier: Peace and War and The Sandline Affair*. Edinburgh: Mainstream.
- Weber, M., A. M. Henderson, dan T Parsons. 1947. *The Theory of Social and Economic Organization*. New York: Oxford University Press.
- Yin, R. K. 2011. *Qualitative Research from Start to Finish*. New York: The Gulford Press.

Jurnal

- Buzan, B. 1991. New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century. *International Affairs : Royal Institute of International Affairs Journal*. 67(3) : 435.
- Churchill, W. 1980. U.S. Mercenaries in Southern Africa: The Recruiting Network and U.S. Policy. *Africa Today*. 27(2): 21-46.
- Singer, P. W. 2001. Corporate Warriors: The Rise and Ramifications of the Privatized Military Industry. *International Security*. 26(37).
- Holmila, E. 2012. History of Private Violence. *KVÜÖA toimetised*.15(15).
- Holmqvist, C. 2005. Private Security Companies: The Case for Regulation. *Stockholm International Peace Research Institute Policy*.3(9).
- Kiernan, G. V. 1957. Foreign Mercenaries and Absolute Monarchy. *Past & Present Journal* . 14(11): 66-86.
- Scheimer, M. 2009. Separating Private Military Companies From Illegal Mercenaries in International Law: Proposing an International Convention for Legitimate Military and Security Support the Reflects Customary International Law . *American University International Law Review* 4(15) : 618- 619.

Senekal, B. A. 2012. South Africa's Role In The Private Military Industries In The Post-Cold War Conflict Environment with Spesific Reference to South African Connection to Erynis International. *Joernaal/Journal*. 37(2): 298.

Shearer, D. 1998. Private Armies and Military Intervention. *Adelphi Paper*. 6(25): 316.

Taaljard, R. 2006. Implementing South Africa's Reulation of Foreign Military Assistance Act. In *Private Actors and Security Governance* 13(1) 167-186.

Website

Areff, A. 2015. *More Private Security than Police & Army Combined - SAIRR*.<https://www.news24.com/SouthAfrica/News/More-private-security-than-police-army-combined-SAIRR-20150923>. [Diakses pada 7 Juni 2018].

Ashworth, M. 1996. *Africa's new enforcers*. The Independent Web Site:<https://www.independent.co.uk/news/africas-new-enforcers-1363564.html>. [Diakses pada 8 Juni 2018].

Avant, D. 2009. *Think Again: Mercenaries*. Foreign Policy Web Site: <http://foreignpolicy.com/2009/10/27/think-again-mercenaries/>. [Diakses pada 10 Juni 2018].

Baiocchi, F. 2015. *Isenberg Institute of Strategic Satire* from <http://iissonline.net/>: <http://iissonline.net/south-africas-ageing-white-mercenaries-who-helped-turn-tide-on-boko-haram-2>. [Diakses pada 5 Oktober 2018].

Bloomfield, A. 2013. *108,000 Private Contractors in Afghanistan and "We Have No Idea What They're Doing"*. Global Research. <https://www.globalresearch.ca/108000-private-contractors-in-afghanistan-and-we-have-no-idea-what-theyre-doing/5338211>. [Diakses pada 25 Oktober 2018].

Bofey, D. 2013. *Margaret Thatcher 'gave her approval' to her son Mark's failed coup attempt in Equatorial Guinea*. The Guardian Web Site: <https://www.theguardian.com/politics/2013/apr/14/thatcher-knew-of-equatorial-giunea-coup-attempt>. [Diakses pada 14 September 2018].

Buncombe, A., dan P. Basildon. 2004. *Soldier, actor and businessman: The multi-skilled life of a modern 'dog of war'*. The Independent News Website: <https://www.independent.co.uk/news/world/africa/soldier-actor-and->

businessman-the-multi-skilled-life-of-a-modern-dog-of-war-63947.html.
[Diakses pada 5 Oktober 2018].

Committee of The Red Cross. 1977. *Treaties, States Parties and Commentaries: OAU Convention for the Elimination of Mercenarism in Africa. Libreville, 3rd.* https://ihldatabases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties&xp_treatySelected=485. [Diakses pada 15 Juni 2018].

Count, I. C. 2010. *Iraq Coalition Casualties: Contractors - A Partial List.* from Iraq Coalition Casualty Count: <http://icasualties.org/Iraq/Contractors.aspx>. [Diakses pada 10 Oktober 2018].

CNN. 2008. *Mercenary jailed for coup plot.* <http://edition.cnn.com/2008/WORLD/africa/07/07/mann.coup/>. [Diakses pada 7 September 2018].

Erinys. 2005. *The Erinys Iraq oil protection force: Infrastructure security in a postconflict environment.* www.erinys.net/download/i/mark_dl/u/4006757640/4525039310/erinys-opf.pdf. [Diakses pada 24 September 2018].

Erinys. 2005. *Erinys Limited Company Profile.* Retrieved from Erinys Limited Web Site: <http://www.erinys.net/south-africa/4577169535>. [Diakses pada 24 September 2018].

Evans, I. (2010, April 25). *The Observer Equatorial Guinea.* Retrieved Desember 2018, 25, from The Guardian Web Site: <https://www.theguardian.com/world/2010/apr/25/simon-mann-equatorial-guinea-coup>. [Diakses pada 25 Desember 2018]

Francis, D. 2013. *The Fiscal Times: Policy + Politics*. <http://www.thefiscaltimes.com/Articles/2013/06/03/Pentagon-Has-No-Idea-What-108K-Contractors-Are-Doing#page13/06/03/Pentagon-Has-No-Idea-What-108K-Contractors-Are-Doing#page1>. [Diakses pada 19 Agustus 2018]

Freeman, C. 2015. *The Telegraph.* <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/nigeria/11596210/South-African-mercenaries-secret-war-on-Boko-Haram.html>. [Diakses pada 28 Agustus 2018].

Groll, E., dan S. O'Grady. 2015. *Nigeria Taps South African Mercenaries in Fight Against Boko Haram.* <https://foreignpolicy.com/2015/03/12/nigeria-taps->

south-african-mercenaries-in-fight-against-boko-haram/. [Diakses pada 5 Oktober 2018].

Hosken, G. 2004. *South African elite cops flock to Iraq*. <https://www.iol.co.za/news/south-africa/south-african-elite-cops-flock-to-iraq-225082>. [Diakses pada 17 September 2018].

International Code of Conduct Association, W. 2016. *About: International Code of Conduct Association*. Retrieved from International Code of Conduct Association Web Site: <https://icoca.ch/en/association>. [Diakses pada 18 Agustus 2018].

IRIN, S. W. 2008. *Private Security Firms Look to Africa for Recruits*. <http://www.irinnews.org/feature/2008/03/17>. [Diakses pada 16 Agustus 2018].

Iraq Coalition Casualties Contractors. 2010. <http://icasualties.org/Iraq/Contractors.aspx>. [Diakses pada 22 Oktober 2018]

Macchiavelli, N. (1932). *The Prince*. <www.gutenberg.org/files/1232/1232-h/1232-h.htm>. [Diakses pada 20 Agustus 2018].

McCarthy, N. 2017. *Private Security Industry: Where Private Security Outnumbers Police*. <[ahref="https://www.statista.com/chart/10925/where-private-security-outnumbers-the-police/" title="Infographic: Where Private Security Outnumbers The Police | Statista"><img src="https://infographic.statista.com/normal/chartoftheday_10925_where_private_](https://www.statista.com/chart/10925/where-private-security-outnumbers-the-police/)

McCarthy, N. 2017. *Private Security Outnumbers The Police In Most Countries Worldwide*.<https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2017/08/31/private-security-outnumbers-the-police-in-most-countries-worldwide-infographic/#20b444b210fb>. [Diakses pada 27 Agustus 2018].

McNeil Jr., D. G. 1997. *Pocketing The Wages of War*. <https://www.nytimes.com/1997/02/16/weekinreview/pocketing-the-wages-of-war.html>. [Diakses pada 14 Oktober 2018].

More, T. 2016. *Utopia*. <www.gutenberg.org/files/2130/2130-h/2130-h.htm>. [Diakses pada 23 Oktober 2018].

- New York Times, A. 1997. *Opinion: The New Mercenaries of Africa*. <https://www.nytimes.com/1997/02/02/opinion/the-new-mercenaries-of-africa.html>. [Diakses pada 27 Oktober 2018].
- Nossiter, A. 2015. *Mercenaries Join Nigeria's Military Campaign Against Boko Haram*. <https://www.nytimes.com/2015/03/13/world/africa/nigerias-fight-against-boko-haram-gets-help-from-south-african-mercenaries.html>. [Diakses pada 20 September 2018].
- Petrini, B. 2010. *Homicide rate dataset 1995 – 2008 - World Bank Group*. Retrieved from World Bank Site Resources: http://siteresources.worldbank.org/EXTCPR/Resources/407739-1267651559887/Homicide_Rate_Dataset.pdf. [Diakses pada 12 Oktober 2018].
- Pramisti, N. Q. 2016.. *Indepth: WNI Jadi Tentara Perancis: Demi Uang dan Petualangan*. Retrieved from Tirto.id Web Site: <https://tirto.id/wni-jadi-tentara-perancis-demi-uang-dan-petualangan-849>. [Diakses pada 17 September 2018].
- Provost, C. 2017. *The Industry of Inequality: Why The World Is Obsessed with Private Security*. <https://www.theguardian.com/inequality/2017/may/12/industry-of-inequality-why-world-is-obsessed-with-private-security>. [Diakses pada 7 Juni 2018].
- Sengupta, K. 2008. *An African adventure: Inside story of the wonga coup*. Retrieved from The Independent Web site: <https://www.independent.co.uk/news/world/africa/an-african-adventure-inside-story-of-the-wonga-coup-794470.html>. [Diakses pada 26 Agustus 2018].
- Security, Global. 2017. *Global Security Web Site*: <https://www.globalsecurity.org/military/world/para/executive-outcomes.htm>. [Diakses pada 13 Oktober 2018].
- Security, Global. 2011. *Executives Outcomes Company Profile*. Global Security <https://www.globalsecurity.org/military/world/para/executiveoutcomes.htm>. [Diakses pada 28 Oktober 2018].
- Security, U. N. 2012. *United Nations Human Rights Office of The High Commissioner*. United Nations Human Rights Office of The High

Commissioner. <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/.../GuidelinesAnnexAStatementOfWork.pdf>. [Diakses pada 14 September 2018].

Smith, D. 2015. *South Africa's ageing white mercenaries who helped turn tide on Boko Haram*. The Guardian Media. <https://www.theguardian.com/world/2015/apr/14/south-africas-ageing-white-mercenaries-who-helped-turn-tide-on-boko-haram>. [Diakses pada 4 Oktober 2018].

The Guardians, S. 2004. *Mark Thatcher Charged in Alleged Coup Plot*. The Guardians. <https://www.theguardian.com/world/2004/nov/18/equatorialguinea>. [Diakses pada 26 September 2018].

United Nations Treaty, C. 2018. *Penal Matters: 6. International Convention Against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries*. United Nations Treaty https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVII-I-6&chapter=18&lang=en. [Diakses pada 24 Agustus 2018].

Williams, S. 2006. *Getty Images Stock Photography Inc*. Getty Images: <https://www.gettyimages.com/license/108561465>. [Diakses pada 15 Januari 2018].

Wrigley, C. 1999. *The Privatization of Violence: New Mercenaries and States from Campaign Against Arms Trade* <https://www.caat.org.uk/resources/publications/government/mercenaries-1999#section5>. [Diakses pada 15 Oktober 2018].

Majalah

Angkasa. *Edisi Koleksi Angkasa XXXIII: Tentara Bayaran*. Jakarta: PT Gramedia.

Hukum dan Undang-Undang

Comittee of Red Cross, I. 2010. *Protocol Additional: To The Geneva Conventions of 12 August 1949*. ICRC. Geneva: ICRC.

Government Gazette: Republic of South Africa. (2007, November 16). *No. 27 of 2006: Prohibition of Mercenary Activities and Regulation of Certain Activities in Country of Armed Conflict Act*. Cape Town, Republic of South Africa: Rep of South Africa Government Gazette.

Organization Of African Unity, C. O. 1977. *Oau Convention For The Elimination Of Mercenarism In Africa*. *Oau Convention For The Elimination Of*

Mercenarism In Africa. Libreville: Archive Of Organization Of African Unity.

Press, S. A. 1998. Regulation of Foreign Military Assistance Act No. 15. *Government Gazzette*. Cape Town, Republic of South Africa: Government Gazzette.

Rep. South Africa, G. G. 1998. Regulation of Foreign Military Assistance Act . Cape Town: Republic of South Africa Government Gazzette: Staatskoerant.

